

DISERTASI

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI INDONESIA**

**THE ANALYSIS OF INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENSE
INFLUENCES TOWARDS UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC
GROWTH, THE IMPACTS TOWARDS INCOME GAP IN INDONESIA.**

**NURHIDAYATI ISLAMIAH
P0500316407**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

NURHIDAYATI ISLAMIAH

P0500316407



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

**THE ANALYSIS OF INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENSE
INFLUENCES TOWARDS UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC
GROWTH, THE IMPACTS TOWARDS INCOME GAP IN INDONESIA.**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYATI ISLAMIAH
P0500316407**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 12 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,



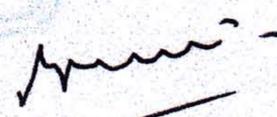
Prof. Dr. Rahmatia., SE., MA
NIP. 196306251987022004

Co.Promotor I



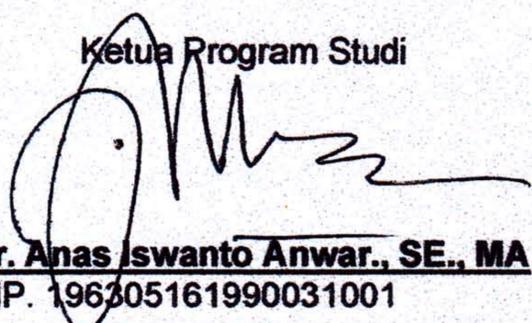
Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA
NIP. 195903061985031002

Co.Promotor II



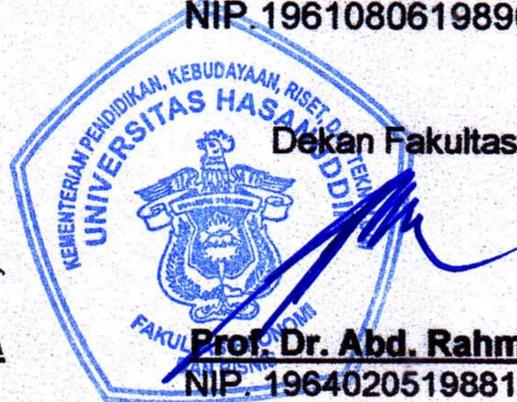
Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D
NIP. 196108061989031004

Ketua Program Studi



Dr. Anas Iswanto Anwar., SE., MA
NIP. 196305161990031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir., SE., M. Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayati Islamiah
NIM : P0500316407
Jurusan / Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, disertasi yang berjudul :

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciptakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



Nurhidayati Islamiah
Nurhidayati Islamiah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Aamiin

Adapun ide gagasan yang melatarbelakangi tulisan ini karena adanya fenomena ketimpangan pendapatan yang menurut penulis layak untuk dikaji dan dianalisis. Penulis ingin merekomendasikan dan menyumbangkan konsep, ide dan gagasan dari tulisan ini dengan beberapa harapan, yaitu : investasi yang langsung berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, berkurangnya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang efektif, dan ketimpangan pendapatan yang terkendali.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun disinilah bukti keterbatasan kemampuan Penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini sangat Penulis harapkan

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya, Penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA** selaku Promotor; **Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA** selaku Ko-Promotor dan **Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph. D** selaku Ko-Promotor, dengan segala ketulusan dan keihlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan,

dengan penuh keseriusan serta kecermatan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan.

Selanjutnya, bahwa dengan selesainya penulisan disertasi dan sekaligus selesainya program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin, tidak lepas dari berbagi bantuan, baik moril maupun materil, dorongan semangat dan doa dari semua pihak, sehingga izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terimakasih yang tulus dan ikhlas, khususnya kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Ekonomi UNHAS, serta seluruh Guru Besar, dan dosen Penulis pada Fakultas Ilmu Ekonomi yang telah memberikan izin, kesempatan, fasilitas dan terutama ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan tak ternilai kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktoral (S3) Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.** selaku Ketua Program Studi (KPS) Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Tim Penguji dan Penilai, baik Penguji dan Penilai eksternal maupun internal yaitu: Bapak **Dr. Erly Leiwakabessy, SE.,M.Si** Sebagai Penguji dan penilai eksternal, Bapak **Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA** Sebagai Penguji dan penilai Internal, bapak **Dr. Paulus Uppun, SE.,MA.** Sebagai Penguji dan penilai Internal, Bapak **Dr.**

Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A Sebagai Penguji dan penilai Internal, Ibu **Dr. Fauziah Umar, SE.,MS** sebagai Sebagai Penguji dan penilai Internal, Ibu **Dr. Nurdwiana Sari Saudi, SE.,M.Si** Sebagai Penguji dan penilai Internal atas segala perhatian, pertanyaan, sanggahan, saran, masukan maupun kritikan dengan segala pengetahuan dan motivasinya selama proses ujian berlangsung demi penyempurnaan disertasi ini.

5. Teristimewa, ucapan terimakasih setulus-tulusnya, yang tak terhingga dan do'a terus menerus tercurahkan kepada Allah SWT, untuk Ayahanda tercinta Penulis "**Drs. H. Baharuddin, SH** adalah sosok pemimpin yang Tangguh serta sering memotivasi penulis untuk terus menjadi yang terbaik dan tetap selalu dijalan yang benar, serta ibu tercinta Penulis "**Hj. Rajeiyah, S.Ag**" atas kasih sayang, perjuangannya melahirkan, dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang, ketulusan, kelembutan bahasa, yang tak kenal lelah, karena doa dan harapan untuk mempunyai anak yang bisa meraih gelar akademik tertinggi (Doktor). Sehingga penulis terus berjuang dan berusaha dengan berbagai pengorbanan untuk menunaikan harapan kedua orang tua Penulis.
6. Ketua STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, Dr. Ir. H. Andi Entong C., M.Si. dan Ibu Hj. Andi Dorawati Ishak, S.E., M.Si. yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, serta memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
7. Seluruh staf dan pengajar STIE Tri Dharma Nusantara yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Ibu Muhibah, ibu A. Rifqah, Bapak Indra, Ibu Ramlah, Ibu Muliati. Terimakasih atas support selama penulis menempuh Pendidikan.

8. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, terkhusus angkatan 2016 atas dukungan dan bantuan selama menempuh pendidikan Ibu Wisdah, Bapak Robert Jao, Ibu Heny, Ibu Lasty, Bapak Jamal, Ibu Lena dan semua Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Selain itu, rekan-rekan lintas angkatan, mulai dari angkatan 2014, 2015, 2017, 2018, dan 2019 yang berinteraksi dan berbagi informasi dengan penulis.
9. Suami tercinta Munawir Lagalung, S.T. yang begitu sabar dan ikhlas mendampingi serta memberikan dukungan tak terhingga kepada penulis. Teristimewa kepada anakku Jehan Alesya Zhafira dan Jizzy Ainayya Murni yang saya kandung selama menempuh pendidikan program S3 dan menemani proses pendidikan hingga selesai. Terima kasih atas kesabaran dan maaf atas waktu yang tersita.
10. Saudara saya Nurul Hikmah B., S.Km.,M.Ph dan Khaeril Hidayat yang selama ini membantu penulis dalam membantu dan menemani setiap proses selama penulis menempuh Pendidikan.
11. Keluarga tersayang Bapak H. Abd. Azis, Ibu Hj. A. Ameliah, Ibu Hj. Suaebah Rahim S.Pd, bapak Abd. Mujib,S.S. ibu Murjiah., S.Pust. terimakasih atas dukungan moril, spirit dan doanya. Semoga Allah swt senantiasa membalasnya pula dengan kebaikan-kebaikan. Aamiin
12. Bapak mertua Almarhum Ir. H. Mukhtar dan ibu mertua almarhum Hj. Murni Lagalung semoga Allah mengampuni segala dosa beliau dan ditempatkan di Surga-Nya

13. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang proses penyelesaian studi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang ilmu Ekonomi di negara Indonesia, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian dalam setiap aktivitas keseharian sebagai bentuk ibadah di sisi-Nya.

Aamiin...

Makassar, Oktober 2021

Nurhidayati Islamiah

ABSTRAK

NURHIDAYATI ISLAMIAH. The Analysis of investment and government expense influences towards unemployment and economic growth, the impacts towards income gap in Indonesia. (Supervised by : Rahmatia, Abd. Hamid Paddu, dan Muhammad Yusri Zamburi).

The Study aims to analyse and to find out the direct and indirect influences of investment and government expense towards income inequality in Indonesia through unemployment rate and economic growth.

The research use statistics analysis equation model. The data used was panel data which is combined from 18 provinces in the western area and 13 provinces in eastern area from 2013-2018 in Indonesia. The data analyzed by using equation estimated model simultan equation model (SEM)

The result of the study indicate that there are differences in the effects generated by direct and indirect investment through unemployment rate and economic growth where affect towards income inequality in western part of Indonesia which is indicated negative influence and not significant directly, investment variable towards income gap and affect negative indirectly investment variable through employment rate and affect negative indirectly through economic growth towards income inequality. Government expense affect positive and significant directly towards income inequality and affect negative indirectly variable government expense through unemployment rate and also affect positive indirectly through economic growth towards income inequality in western Indonesia. While, investment directly influence towards income inequality in the eastern Indonesia affect negative and significant and indirectly influence through unemployment rate affect negative and also affect positive indirectly through economic growth towards income gap in eastern Indonesia. Government expense directly affect positive and significant Towards income inequality and affect positive indirectly variable government expense through unemployment rate and also affect negative indirectly through economic growth towards income inequality in eastern Indonesia. The study describe about the strategy to maximise government expense and investment potency also the Realization of these investment intended to consider the economic growth achievement, decrease unemployment ratio and final achievements which is reduced income inequality ratio. The strategies that can be taken are the development of investment sector potency, infrastruktur and services development, human resources strengthening, also regulation and institutional strengthening among Indonesian sectors.

Keywords : Investment, Government expense, unemployment, economic growth, inequality income.

Kata kunci: investasi, pengeluaran pemerintah, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan

ABSTRAK

NURHIDAYATI ISLAMIAH. *Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi, Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.* (dibimbing oleh Rahmatia, Abd. Hamid Paddu, dan Muhammad Yusri Zamhuri).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis statistika. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari 18 provinsi di wilayah barat dan 13 provinsi di wilayah timur tahun 2003-2019 di Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan metode estimasi persamaan Simultaneous Equation Model (SEM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang dihasilkan oleh investasi secara langsung dan tidak langsung melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang dimana berefek terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia wilayah barat yaitu terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan secara langsung variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh positif secara tidak langsung variabel investasi melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh negative secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh positif secara tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah baik melalui tingkat pengangguran maupun melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah barat Indonesia. Sedangkan pengaruh investasi secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah timur Indonesia berpengaruh negative dan signifikan dan pengaruh tidak langsung melalui tingkat pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah timur Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh positif secara tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh negative secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah timur Indonesia. hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi dalam memaksimalkan potensi investasi dan pengeluaran pemerintah serta realisasi investasi tersebut yang diperuntukkan untuk pertimbangan mencapai pertumbuhan ekonomi, menurunkan rasio pengangguran serta capaian akhir yakni berkurangnya rasio ketimpangan pendapatan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh yakni dengan pengembangan potensi sector investasi, pengembangan infrastruktur dan pelayanan, penguatan sumberdaya manusia, serta penguatan regulasi dan kelembagaan antar sektor di Indonesia.

Kata kunci: investasi, pengeluaran pemerintah, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Di Indonesia sendiri, ketimpangan pendapatan masih sangat tergolong tinggi. Tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan oleh beberapa factor seperti, masyarakat berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan Pendidikan yang berdampak buruk bagi proses pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Factor lainnya seperti perbedaan tingkat investasi diberbagai sector dan wilayah di Indonesia.

Investasi adalah merupakan realisasi besarnya dana Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dakam Negeri (PMDN) yang dihitung setiap tahunnya dalam milyaran rupiah. Investasi di Indonesia sendiri diatur dalam berbagai peraturan pemerintah seperti diantaranya adalah Undang-Undang No, 25 tahun 2007, Undang-undang No. 37 Tahun 1999, Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah, Undang-undang No. 1 Tahun 2004, UUD pasal 5 ayat (2) dimana Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu

mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (PP No. 8 Tahun, 2007).

Ragam investasi pemerintah diatur dalam pasal 3 ayat (2) dimana investasi dilakukan dalam bentuk surat berharga atau investasi langsung, bidang investasi pemerintah meliputi pengembangan jasa pelayanan umum, pengembangan askes pelayanan dan pembiayaan kegiatan usaha masyarakat, pengembangan usaha BUMN / BUMD dan pengembangan usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah. Wujud investasi yang dominan adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembelanjaan investasi pemerintah berupa infrastruktur telah menghabiskan anggaran sebesar 410,4 triliun rupiah. Tentu saja pemanfaatan potensi investasi melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur telah berhasil memberikan manfaat dari segi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga di tahun 2018. Trejo et al., (2017); Khodeir (2016); Guerrazzi (2015); Sadikova, Faisal, dan Resatoglu (2017) menyatakan bahwa investasi merupakan landasan utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran (Afidchao et al., 2014; Szkorupová, 2014; Mihaiu dan Opreana, 2013).

Investasi Indonesia saat ini berfokus pada peningkatan akses permodalan baik luar maupun dalam negeri. Khususnya investasi dibidang manufaktur dan industri infrastruktur disambut baik dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara. Tentunya proyeksi investasi Indonesia tersebut adalah untuk mengurangi biaya logistic dan meningkatkan daya saing nasional.

Ditengah peluang yang ada, perekonomian dunia tengah berpindah kebenua asia, Indonesia memiliki sejumlah peluang besar untuk mewujudkan iklim investasi

baik skala makro dan mikro dengan begitu baik dalam jangka panjang salah satunya investasi dibidang infrastruktur, investasi dibidang ekonomi kreatif dan digital (Puput Ady Sukarno, 2019). Kendatipun demikian, hambatan klasik persoalan investasi di Indonesia juga terus bergulir, salah satu hambatan utama dalam berinvestasi adalah alur birokrasi dan perizinan yang dinilai belum optimal koordinasinya antara pusat dan daerah (www.republika.co.id, 2018; www.kemenprin.go.id, 2018), kelemahan dalam memenuhi pasokan energi yang dibutuhkan oleh industri dan konsentrasi sebaran investasi yang hanya berpusat pada satu wilayah tertentu saja (www.nasional.kontan.co.id, 2010).

Faktor perbaikan regulasi dan pengefektifan investasi pemerintah merupakan salah satu aspek kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam aspek efektivitas regulasi adalah melalui perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif dan mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan salah satunya adalah penerapan *tax amnesty*, *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang bertujuan untuk meningkatkan basis pajak untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, *tax holiday*, data dan system informasi perpajakan serta peningkatan pelayanan dan efektifitas organisasi lingkup perpajakan. Kebijakan lain yang ditempuh juga melalui penyempurnaan peraturan, peningkatan pengasan dan pengelolaan, optimalisasi PNPB serta perbaikan layanan publik (www.kemenkeu.go.id, 2018). Hal ini bertujuan agar sinergitas antara investasi yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Kudasheva et al., 2015; Halvarsson et al., 2018).

Peningkatan investasi pada level mikro bertujuan untuk menumbuhkan gairah usaha masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dapat terwujud (Halvarsson, Korpi, dan Wennberg, 2018). Postur APBN 2018 yang merefleksikan sektor investasi pemerintah, mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur nasional yang pengalokasian anggaran mencapai 410,4 Triliun rupiah dialokasikan pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), kementerian perhubungan, DAU serta investasi pemerintah Indonesia PMN (Penyertaan Modal Negara) dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang dimana kebijakan investasi pada sector infrasktruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antar-moda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Pembiayaan investasi Indonesia meningkat dari tahun 2017 sebesar 59.7 triliun menjadi 65.7 triliun pada tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id, 2018).

Lebih lanjut, upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain investasi adalah melalui pengefektifan belanja negara (*government expenditure*). Pada APBN 2018, total belanja negara menghabiskan anggaran sebesar 2.220,7 triliun rupiah, dimana kategori belanja negara terbesar dianggarkan untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 847,4 triliun rupiah, transfer kedaerah dan dana desa sebesar 766,2 triliun dan belanja non K/L sebesar 607,1 triliun rupiah (www.kemenkeu.go.id, 2018). Dimana tujuan daripada belanja negara tersebut adalah untuk mensinergikan program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial, salah satunya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut kebijakan belanja negara yang dominan pada sektor pendidikan dan kesehatan terbukti secara empiris mampu mengatasi ketimpangan sosial secara langsung maupun tidak

langsung (Lavrinovicha et al., 2015; O'Campo et al., 2015; Shen, Yang, dan Zanna, 2018; Kim, 2016).

Belanja negara yang tepat guna menjadi tujuan yang dicita-citakan atas dasar efisiensi dan efektivitas yang juga dapat berdampak secara nyata terhadap penurunan rasio ketimpangan sosial dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengalokasian dana yang lebih runtut pada aspek investasi menurut Raišienė, Bagdonienė, dan Bilan (2014); Qiong dan Junhua (2015); Bouwmeester dan Scholtens (2017). Selain daripada itu kebijakan pada aspek *government expenditure* yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan ditempuh melalui kebijakan penyelenggaraan pemerintah guna menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan efektivitas birokrasi. Antisipasi risiko terkait kebijakan *government expenditure* juga dialokasikan guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana. Oleh karena itu dalam APBN Indonesia di tahun 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan pendanaan sebesar 347,4 triliun rupiah untuk memenuhi sektor pelayanan umum, sebanyak 157.6 triliun rupiah untuk sektor perlindungan sosial dan 143.1 triliun rupiah untuk sektor pendidikan (www.kemenkeu.go.id, 2018). Upaya tersebut untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi sekaligus mengurangi efek dari pada pengangguran.

Masalah pengangguran akan berdampak secara universal terhadap peningkatan kualitas hidup, hal ini dapat juga bersinggungan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan negara. Kausalitas ini sangat memiliki kaitan erat mengingat tenaga kerja merupakan salah satu aspek dasar produksi (*man, capital, and land*) ekonomi klasik. Permasalahan pengangguran utamanya

ditenggarai oleh peran pendidikan yang memadai untuk membentuk permintaan tenaga kerja yang berskill dipasar tenaga kerja (Kudasheva et al., 2015). Sehingga aspek penting dalam persoalan kebijakan pemerintah mewajibkan aspek Pendidikan sebagai salah satu investasi utama untuk menyongsong tenaga kerja terampil guna menekan angka pengangguran dan mengatasi ketimpangan pendapatan (Halvarsson et al., 2018). Pendapat tersebut sejalan dengan fakta yang tengah terjadi dimana Badan Pusat Statistik Indonesia merilis angka tingkat pengangguran sebanyak 7 juta orang dan didominasi lulusan SMA / SMK (Damianus Andreas, 2018).

Selain daripada itu hal pokok yang diakibatkan daripada tingginya tingkat pengangguran juga menyebabkan pendapatan yang diterima juga menjadi rendah dan konsumsi masyarakat (*consumption otonom*) juga rendah (Guerrazzi, 2015; Gächter et al., 2017). Kebijakan pemerintah dalam hal investasi pada sektor perluasan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan berat yang membutuhkan peran serta banyak pihak. Berdasarkan status pekerjaannya yang ditunjukkan pada gambar 3 menyatakan bahwa pada 2017 sejumlah 52 juta jiwa (42,97 persen) penduduk bekerja pada sektor formal (buruh tetap / karyawan / pegawai. Jumlah tersebut bertambah 1,79 juta jiwa dibanding posisi Agustus 2016. Sementara masyarakat yang berkerja di sektor informal pada Agustus 2017 mencapai 69,02 juta jiwa (57,03 persen), jumlah tersebut bertambah 820 ribu jiwa dibanding posisi Agustus 2016.

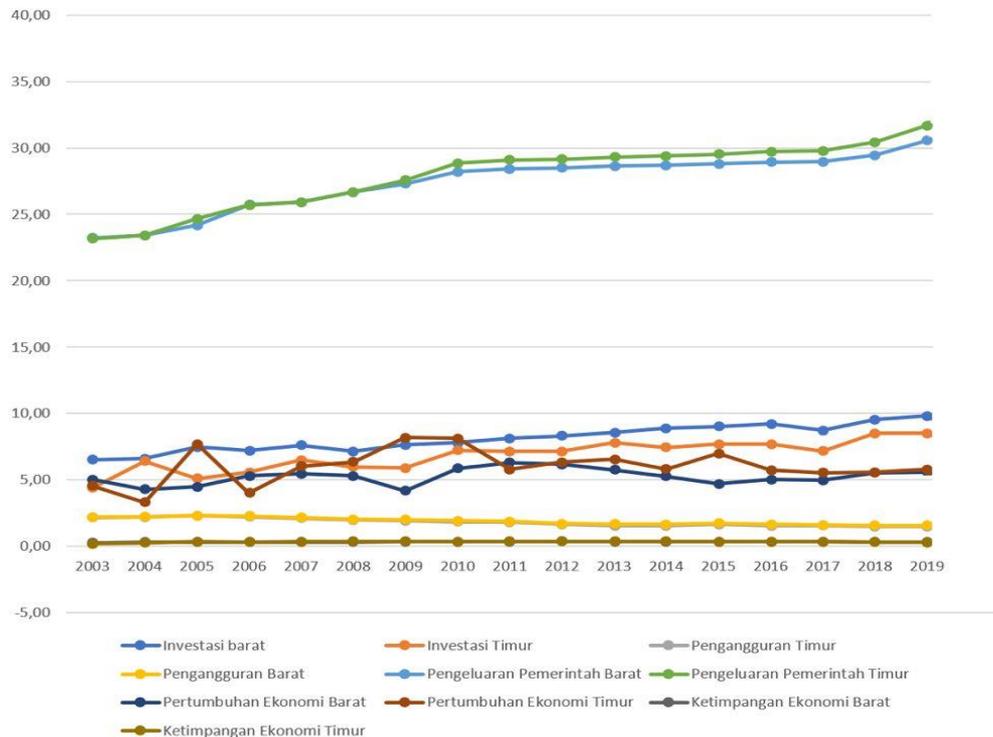
Paparan teoritis dan pengungkapan fenomena factual mengenai keterkaitan investasi, pengeluaran pemerintah (*Government expenditure*) dalam kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Melahirkan gagasan pokok terkait beragamnya

kesesuaian dan ketidaksesuaian antara teori, fakta dan hasil pengujian empiris guna menjembatani hasil penelitian sebelumnya dan penelitian kami hari ini. Hasil penelitian dari Adriana (2014); Roşoiu (2015); Sadiku et al (2015) yang dilakukan di Negara Macedonia menyimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan rasio pengangguran.

Penelitian lainnya yang dinilai memiliki keterbatasan dalam pengungkapan dan pengujian variabel dalam mengukur tingkat pengangguran juga ditunjukkan dari hasil penelitian Ghoshray et al (2016); Khodeir (2016); Strat et al (2015) dimana mereka menyatakan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Salah satu penelitian menemukan fakta bahwa investasi pembangunan manusia salah satunya dimulai dari peningkatan pendidikan yang lebih baik sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga keterkaitan antara investasi dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) melalui sektor pendidikan berdampak langsung ketimpangan pendapatan bagi angkatan kerja produktif (Lavrinovicha dan Teivans, 2015; www.bbc.com, 2014). Selain daripada itu sebaran angka pengangguran tertinggi menurut provinsi yang di rilis oleh badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 131,55 juta orang angkatan kerja dimana 124,54 juta telah bekerja. Sisanya sebanyak 7,01 juta orang menganggur. Pengangguran terbuka (TPT) adalah golongan yang masuk kategori angkatan kerja, namun belum punya pekerjaan. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,33 persen atau menurun 0,28 persen dari tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki urutan ketiga tercepat diantara negara G-20 lainnya, pernyataan ini sesuai dengan penjelasan angka statistic tahun 2000 – 2017 menunjukkan angka PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia

per kapita meningkat 4% setiap tahun setelah China dan India (Yenny Tjoe, 2018). Gini Indeks ratio negara Indonesia juga meningkat dari 30 pada era tahun 90-an menjadi 39 di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan sehingga memicu ketimpangan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan yang bergerak lambat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipicu oleh beberapa aspek yang fundamental yakni kualifikasi pendidikan serta permintaan pasar terhadap tenaga kerja profesional (*labor market and skill labor*) dan berketerampilan yang juga ikut meningkat (www.worldbank.org, 2015). Selanjutnya pada gambar 1 menjelaskan secara komprehensif tentang tren investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dengan detail pada gambar berikut.



Gambar 1. Data BPS Tren Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan Indonesia Tahun 2003-2019

Tergambar jelas pada gambar 1. tentang tren investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan Indonesia dimana upaya pemerintah Indonesia untuk menekan penurunan rasio ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Indonesia yakni dengan menaikkan level pengeluaran pemerintah. Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 tingkat pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tingkat pengeluaran pemerintah kemudian memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; khususnya bagi wilayah timur Indonesia.

Seperti dijelaskan pada gambar 1. laju investasi dan tingkat pengeluaran pemerintah yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan khususnya di wilayah timur Indonesia; menyebabkan *spread-effect* bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia yang kemudian memberikan dampak bagi menurunnya tingkat pengangguran di wilayah timur yang kian signifikan. Sejalan dengan hasil kajian empiris mengenai keterkaitan antara tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh Gächter et al (2017) dan Shao et al (2016) yang menyatakan bahwa korelasi kuat dapat terjadi apabila tingkat pengangguran dapat ditekan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan.

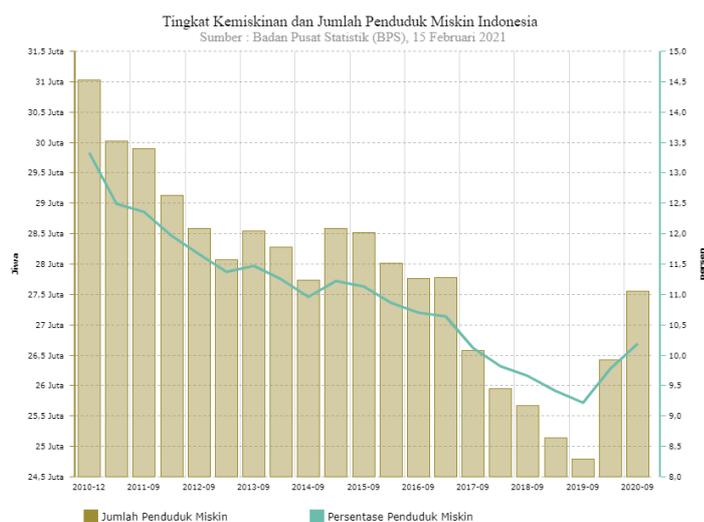
Belanja negara yang terealisasi dalam bentuk pengeluaran pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Langkah kebijakan

pengeluaran pemerintah Indonesia adalah diantara lain untuk membiayai peningkatan kualitas SDM. Misalnya rancangan alokasi APBN Indonesia tahun 2020; dimana realisasi peningkatan kualitas SDM diwujudkan dalam bentuk mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi melalui KIP kuliah. Kemudian aspek peningkatan kualitas SDM juga direfleksikan melalui kartu pra-kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas bagi para pencari kerja; serta keberlanjutan penyediaan layanan Kesehatan melalui peningkatan besaran bantuan iuran. Serta belanja negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur melalui pemerataan pembangunan antar wilayah serta percepatan pengembangan lima destinasi wisata di Indonesia menjadi super prioritas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui sector pendidikan yakni dengan cara mengalokasikan 20% APBN yakni sekitar 508,1 triliun rupiah yang ditargetkan untuk mendanai sector Pendidikan yang kemudian dibagi berdasarkan prioritasnya masing-masing misalnya Rp. 11,1 triliun rupiah untuk KIP, Rp. 4,5 triliun untuk bantuan operasional Pendidikan tingkat PAUD, Rp. 6,7 triliun rupiah untuk KIP kuliah, Rp. 64 triliun untuk bantuan operasional sekolah, Rp. 1,8 triliun untuk beasiswa S2/S3, Rp. 8 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan ruang kelas, Rp. 4,4 triliun untuk tujuan pembangunan dan rehabilitasi universitas serta Rp. 284,1 milyar untuk riset oleh LPDP.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, dimana prestasinya menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam hal penurunan tingkat kemiskinan sejak tahun 1999 (Yenny Tjoe, 2018). Indonesia juga merupakan negara dengan populasi keempat terbesar dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (Putra, Said, dan Hasan, 2017). Akan

tetapi persoalan penurunan tingkat kemiskinan, belum dibarengi dengan penurunan rasio ketimpangan pendapatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk terkaya dengan presentase 20% daripada masyarakat lainnya (www.worldbank.org, 2015) bahkan ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin di Indonesia masih tergolong tinggi. Ketimpangan tercermin dari akumulasi kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat tertinggi dengan presentase sebesar 49,3% dari Sembilan negara (Rusia, Thailand, India, Brazil, Tiongkok, Amerika Serikat, Afrika selatan dan Meksiko), 49,3% menunjukkan bahwa kekayaan nasional dimiliki oleh 1% warga negara kaya saja (Widyanita, 2017). Pada gambar 2 juga dijelaskan mengenai presentase penduduk miskin di Indonesia dalam beberapa decade terakhir.



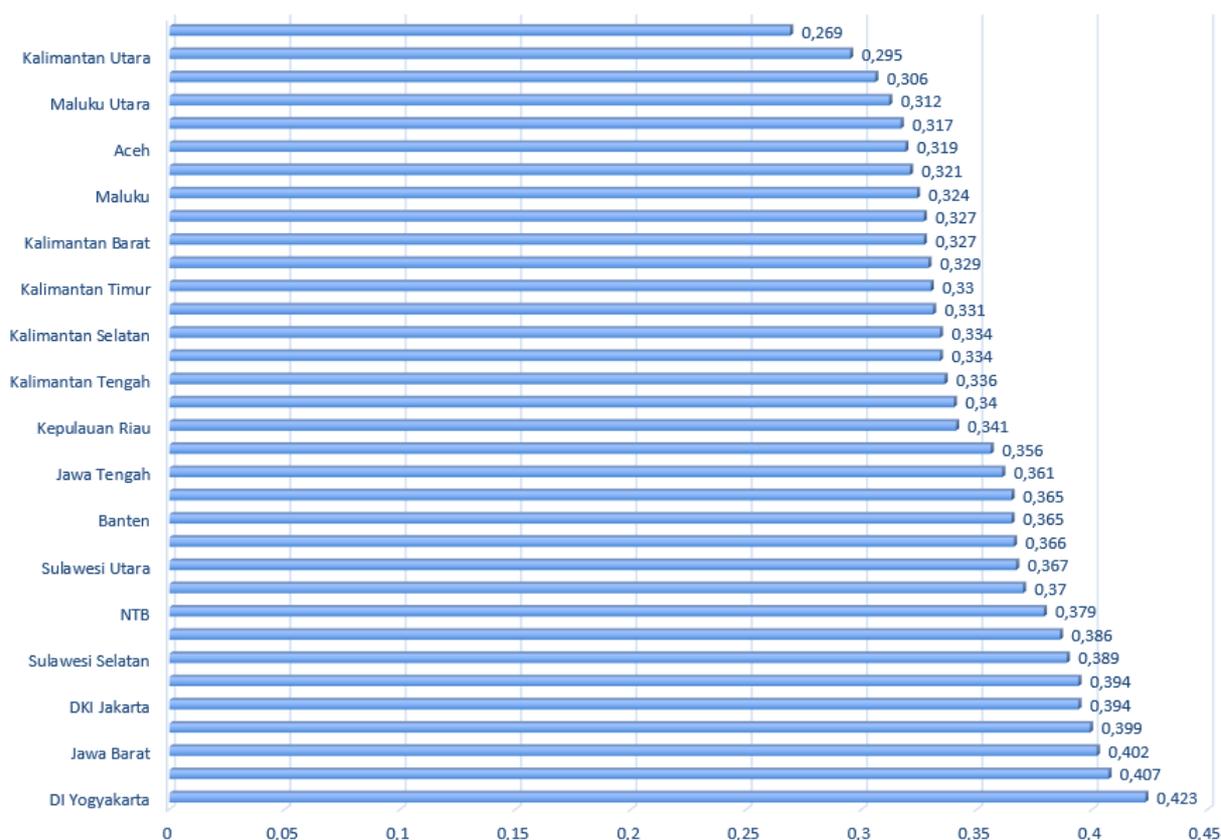
Gambar 2. Data BPS Tingkat kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Sejak Tahun 2010 - 2020

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya persoalan kemiskinan merupakan refleksi dari besarnya tingkat ketimpangan pendapatan dapat berakibat pada

aspek dasar pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia seperti makanan, kesehatan dan pendidikan (Ram, 1982; Ram, 1992; Di Domenico dan Fournier, 2014) sehingga ikut berdampak signifikan pada proses percepatan pembangunan manusia (IPM). Ketimpangan ditunjukkan dengan gini ratio untuk mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk dengan kisaran 0 untuk pendapatan merata sempurna hingga 1 untuk ketimpangan pendapatan sempurna.

Di Indonesia terdapat delapan provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas rasio gini nasional, yakni Provinsi DI Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399), DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,386). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan rerata nasional, dengan rasio gini sebesar 0,379 dan 0,370. Adapun provinsi yang memiliki ketimpangan terendah terdapat di Bangka Belitung sebesar 0,269 lalu Kalimantan Utara sebesar 0,295 dan Sumatera Barat sebesar 0,306. Di Indonesia sendiri kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan dapat ditempuh melalui beberapa langkah strategis seperti perbaikan layanan umum, penguatan pada aspek perlindungan social (Gächter et al., 2017), pelatihan bagi tenaga kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pungutan pajak (www.worldbank.org, 2015). Menurut Gächter et al., (2017) dengan pendekatan *Equilibrium Theory* menjelaskan bahwa perbedaan status *socio-economics* berdampak pada tingkat kesejahteraan. Akan tetapi terdapat Gap pada hasil studi yang berbeda yang dikemukakan oleh Han, Zhao, dan Zhang (2015) yang

menyatakan bahwa gini ratio dan total income per kapita tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 3. Data BPS Provinsi di Indonesia yang memiliki angka Ketimpangan diatas Rasio gini agregat secara nasional Tahun 2017

Dalam teori ekonomi makro, pembangunan manusia (IPM) tergantung pada dua aspek utama yakni, pertumbuhan ekonomi dan menurunnya ketimpangan antar penduduk (Sargent, 2009; Davidson, 2011). Peningkatan Indeks Pembangunan manusia yang sistematis diperlukan upaya pemerintah dari segi peningkatan pada sektor pendidikan yang merata, sebab ketimpangan pendapatan disebabkan salah satunya oleh tingginya angka pengangguran. Di tahun 2016, hasil penelitian dari Lavrinovicha et al (2016) ; Kim dan Shao et al (2016); Kudasheva, Kunitsa, dan Mukhamediyev (2015) menyatakan bahwa ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan bersumber

dari tidak meratanya akses pendidikan. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang berefek langsung pada tingginya angka pengangguran juga akan berdampak pada ketimpangan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Kim, 2016; Shao et al., 2016). Sehingga harapan yang ingin dicapai adalah pemerataan dari segala aspek untuk mencegah terjadinya ketimpangan ditengah masyarakat (Gächter et al., 2017).

Pengukuran ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan potensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Goschin, 2015). Banyak peneliti telah mengkaji hubungan kausalitas antara keduanya dengan berbagai sudut pandang penelitian (e.g., Hassan, Zaman, dan Gul, 2015; Lyubimov, 2017) dengan pendekatan *Kuznets Theory* menyatakan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan dapat ditempuh pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang di uji secara komprehensif. Sejalan dengan itu Blundell et al (2018) Birčiaková, Stávková, dan Antošová (2014) dengan pendekatan *inequality theory* dengan pendekatan studi komprasi lebih dalam menyatakan bahwa selain kebijakan pemerintah, susunan ketatanegaraan dan pola pemerintahan juga memberikan andil besar dalam hal penurunan atau peningkatan tren ketimpangan pendapatan. Dalam hal kebijakan pemerintah, mengingat sumber pendapatan negara lebih dominan bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak (PNBP).

Sama halnya pada negara berkembang lainnya, ketimpangan pendapatan masih merupakan masalah yang sulit untuk di selesaikan. Di Indonesia sendiri, negara yang terbagi atas wilayah barat dan timur, terlihat jelas adanya ketimpangan dari wilayah tersebut. Hal utama yang mebedakan kedua wilayah yang ada di Indonesia yaitu diakibatkan oleh pilihan kebijakan yang berbeda-beda. Apabila kebijakan yang dibuat untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada

diwilayah barat, maka ketimpangan akan turun secara cepat, akan tetapi akan semakin memperlebar ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah timur Indonesia.

Oleh sebab itu studi peneliti melihat adanya celah kritis dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan bahwa pengungkapan korelasi rasio pengangguran hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi saja. Sehingga novelty yang dikembangkan distudi ini adalah menambah variabel investasi dan variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) guna mengukur tingkat efektivitasnya untuk mengurangi rasio pengangguran yang kemudian pengukuran tentang efektifitas pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi juga diukur dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Disisi lain, dalam bukti empiris di beberapa penelitian terdapat hasil yang berbeda ditunjukkan oleh beberapa hasil studi seperti yang dikemukakan oleh Strat et al (2015); Khodeir (2016); Ghoshray et al (2016) yang menyatakan bahwa investasi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Adanya perbedaan hasil kajian yang dikemukakan oleh beberapa penelitian ditengahi oleh perbedaan proses pengambilan keputusan pemerintah yang tertuang didalam kebijakan pemerintah dalam mencover investasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan (*Policy*) memang memegang peranan vital dalam menunjang iklim investasi yang kondusif dan memadai (Roşoiu, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada penjabaran dari latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia?
5. Apakah ada perbedaan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan timur Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sebuah konsep baru dan model penelitian empiric untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Upaya untuk menjembatani hal tersebut, penelitian ini mengembangkan model penelitian melalui jalinan hubungan langsung dan intervening untuk menjawab pertanyaan penelitian dimana secara khusus penjabaran tentang tujuan studi empiris ini untuk menjawab antara lain:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung investasi pada wilayah Barat terhadap ketimpangan pendapatan melalui pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah pada wilayah barat terhadap ketimpangan pendapatan melalui pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung investasi pada wilayah timur terhadap ketimpangan pendapatan melalui pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah pada wilayah timur terhadap ketimpangan pendapatan melalui pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk mengukur dan menganalisis perbedaan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan timur Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka hasil dari penelitian ini diupayakan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: yakni memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoritis keilmuan bidang ilmu yakni pemahaman secara makro dan mikro keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan

ekonomi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan baik di wilayah barat maupun timur Indonesia

- b. Manfaat Praktis: Selain daripada itu implikasi secara managerial diupayakan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah mengenai pentingnya mengatur regulasi yang efektif, efisien dan pro pembangunan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penekanan tingkat pengangguran, efektivitas investasi dan pengeluaran pemerintah guna menciptakan pemerataan untuk mengurangi rasio ketimpangan pendapatan baik di wilayah barat maupun timur Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah (Liyanaarachchi et al., 2016). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Fahrudin Zain dan Aditya Halim Perdana Kusuma, 2020). Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Hidayat, 2014). Menurut Kuncoro (2006) ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2004)

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi

dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Arfah et al., 2020). Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012). Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Laurens dan Perdana Kusuma Putra, 2020).

Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional, perbedaan laju pertumbuhan pendapatan regional yang cukup besar antar wilayah, telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang ketika faktor produksi bergerak perbedaan laju pertumbuhan output antar wilayah cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata antar wilayah. Disparitas regional di Indonesia disebabkan antara lain oleh kebijakan yang diterapkan pada Undang-Undang (UU) no. 5 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua pendapatan daerah yang meliputi pendapatan dari hasil kekayaan alam di sektor pertambangan, minyak bumi, gas, hutan dan perkebunan. Sumber-sumber tersebut ditetapkan sebagai penerimaan Negara.

Akibatnya daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak menikmati hasilnya secara layak. Dengan diberlakukan dan diterapkannya Undang-undang

otonomi daerah no. 32 tahun 2004, maka daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi daerah, terutama dalam merumuskan dan sekaligus mengimplementasikan penggunaan sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya diarahkan pada peningkatan, perluasan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendorong pemerataan serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga diharapkan dapat mempertinggi kesejahteraan social masyarakat (Afidchao et al., 2014). Salah satu indikator penting yang dapat dilihat dari pembangunan ekonomi daerah, terutama untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, adalah dengan memperhatikan struktur perekonomian melalui kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Hidayat, 2014). Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur

ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negaranegara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik. Kebenaran hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan *data time series* dan *cross section* (Hassan et al., 2015). Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya. Kuznets, (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan.

Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu kemudian mengalami penurunan. Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern (Kuznets, 1955).

Evolusi Disparitas Pendapatan Wilayah atau perubahan kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh hipotesis Kuznets. Dengan menggunakan data antar negara (*cross section*) dan data dari sejumlah observasi runtun waktu (*time series*) setiap negara, Simon Kuznets menemukan suatu hubungan berbentuk U terbalik (*inverted U Hypotesis*) antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar daerah (Kuznets, 1955).

Pembangunan ekonomi di daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi rendah. Begitu pula konsentrasi penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan adanya disparitas penduduk antar daerah. Menurut Tulus (2001) factor- faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah (Nam, 2019). Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 2. Alokasi Investasi Menurut Harrod-Domar menerangkan bahwa ada korelasi positif antar tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa investasi rendah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat rendah karena rendahnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif (Stuart Chapin et al., 2012). 3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Rendah Antar Daerah Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti

tenaga kerja dan kapital, merupakan faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi regional (Goschin, 2015). Realisasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antar daerah dapat lebih jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakat lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam (Wilhelm dan Maconachie, 2020).

5. Perbedaan Kondisi Demografis Kurang Lancarnya Perdagangan Kesenjangan ekonomi regional juga disebabkan perbedaan kondisi demografis antar daerah, terutama dalam pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja (Components, 2011)

Williamson menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh (Myrdal dan Sitohang, 1957). Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan *spread-effect* dan *backwash-effect* sebagai pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* (dampak sebar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (*favourable effect*), mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian (*infavourable effect*), mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah

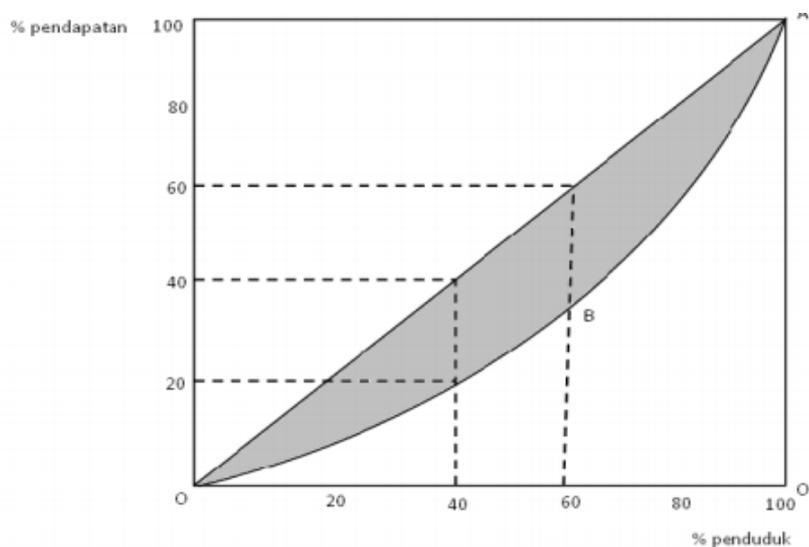
pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti (Zhan dan Chen, 2021) dan (Chiang, 2018).

Menurut Myrdal dan Sitohang, (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Kang et al., 2021).

Secara umum ukuran ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan memperbandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional, Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional dan Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional (Badan Pusat Statistik, 2018). Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan *size distribution* dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan garis horisontal persentase penduduk dan garis vertikal sebagai persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok

penduduk, maka data dalam size distribution bisa digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz (Gastwirth, 1971)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



Gambar 4. Kurva Lorenz

Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk tersebut. Garis diagonal merupakan garis “kemerataan sempurna” dalam distribusi ukuran pendapatan persentase yang sama dari total pendapatan. Kurva Lorenz ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama misalnya satu tahun. Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin

tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horisontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak disebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah (Lincoln Arsyad, 1997).

Ukuran ketiga adalah Indeks Gini yang dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya dengan memperbandingkan atau membafi bidang yang dibatasi oleh garis diagonal dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal (Gastwirth, 1971). Angka yang didapatkan kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini Indeks gini berkisar antara nol dan satu. Gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 artinya ada ketidakmerataan yang sempurna (Groves-Kirkby et al., 2009).

Adelman dan Morris, (1973) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan per kapita; Inflasi yaitu bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak dengan pertumbuhan produksi barang-barang; Ketimpangan pembangunan antar daerah (Candemir dan Zalluhoglu, 2011); Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari

tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah; Mobilitas sosial yang rendah; Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; Ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, dan Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain menjadi hancur (Adriana, 2014).

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat (Hu, 2019). Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relative (de Bercegol dan Monstadt, 2018). Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan yang diterima

seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Nurwati, 2008).

B. Tinjauan Teoritis Hubungan Antar Variabel Eksogen dan Endogen

1. Hubungan teoritis Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Jain dan Gandhi, 2016). Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut (Sukirno, 2004) adalah merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah, Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

Investasi dalam ekonomi makro, juga dapat dibedakan atas investasi otonom (*otonomus investment*) dan investasi terpengaruh (*induced investment*) (Yessentay et al., 2020). Investasi otonom adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (Ulmer, 1952). Jenis investasi ini umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan

maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terpengaruh adalah investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa (Nguyen, 2019). Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Kemudian, dalam prakteknya sebagai usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran yaitu pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan, Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya; dan penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional (Scharlemann et al., 2020). Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan di peroleh investasi netto (Nguyen, 2019).

Menurut Jhingan (1996) investasi atau pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah negara terbelakang ataupun berkembang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Hal ini sebagaimana juga dipertegas oleh

Félix (1996) bahwa lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang atau berkembang dapat digunting melalui investasi atau pembentukan modal. Lebih rinci lagi dikatakan oleh Neary (1981) bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya serta kemajuan teknologi (Cheng et al., 2013). Akan tetapi, bagi negara-negara terbelakang atau berkembang pembentukan modal umumnya masih rendah. Menurut Jhingan (1996) penyebabnya adalah Pendapatan rendah yang dikarenakan pertanian, industri dan sektor lain di Negara berkembang masih terbelakang, output nasional menjadi rendah dan begitu juga pendapatan nasional. Akibatnya, pendapatan perkapita rendah. Pada pihak lain, kecenderungan berkonsumsi sangat tinggi sehingga seluruh pendapatan habis dikonsumsi. Akhirnya, menabung menjadi tidak mungkin dan tingkat pembentukan modal tetap rendah (Mortimer dan Weeks, 2019). Produktifitas rendah karena langkanya buruh yang efisien dan pengetahuan teknologi rendah, sumber alam sering dimanfaatkan secara keliru atau malah tidak dipergunakan, akibatnya menghambat peningkatan pendapatan pemilik sumber alam hingga tidak mampu untuk menabung dan berinvestasi sehingga laju pembentukan modalpun tidak meningkat (Kilinç, 2013). Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan keseluruhan pendapatan dipergunakan untuk menghidupi tambahan penduduk dan hanya sedikit yang ditabung untuk pembentukan modal (Adriana, 2014). Pertambahan wiraswasta menjadi semakin kecil diakibatkan oleh kurangnya modal, langkanya milik pribadi dan perjanjian memperlambat usaha dan inisiatif untuk berwiraswasta sedangkan

dalam kenyataannya kewiraswastaan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi (Roy dan Shijin, 2019).

Ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketidakmerataan pendapatan di negara berkembang dimana hanya sekitar 3-5 persen berpenghasilan tinggi dan mereka ini berinvestasi tidak pada saluran yang produktif menyebabkan pembentukan modal tetap rendah. Pasar sempit karena kemampuan untuk menyerap penawaran suatu produk baru, menyebabkan tidak bergairahnya tumbuhnya usaha dan inisiatif masyarakat sehingga upaya pembentukan modal tetap rendah (Turkyilmaz et al., 2020). Kekurangan lembaga Keuangan Karena kurang berkembangnya pasar uang, pasar modal, lembaga kredit dan bank di Negara berkembang menyebabkan pengerahan dana tabungan dalam jumlah yang cukup untuk tujuan investasi menjadi rendah (Haltenhof et al., 2014)

Keterbelakangan ekonomi dan teknologi yang menjadikan aktifitas ekonomi yang terbatas dan terbengkalai, efisiensi buruh yang rendah, nilai dan struktur sosial yang tradisional serta teknik produksi yang masih kuno telah menghambat pembentukan modal. Menurut Haryanto (2013), ada beberapa teori yang dapat menjelaskan seberapa besar tingkat investasi yang dapat diusahakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun wilayah, yang pertama, Teori Usaha Perlahan-lahan (*Gradualist Theory*) Teori ini berpendapat bahwa negara yang terbelakang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi cepat-cepat sebab resiko dan kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul (Castle, 2001). Injeksi kapital yang banyak adalah kurang baik sampai perekonomian tersebut mampu menyerapnya. Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi

harus diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa yang menggunakan kelebihan tenaga buruh (Li et al., 2011).

Kegiatan yang membutuhkan kapital yang banyak akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat *karya (labor intensive)*. Kedua, Teori Dorongan Besar (*Big Push Theory*) Teori ini secara singkat mengatakan bahwa jika hanya ada sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini hanya mendorong pertumbuhan penduduk saja yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan perkapita (Easterly, 2006). Oleh karena itu, usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk (Easterly, 2006). Implikasinya ialah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadang membutuhkan kapital yang besar (Nam, 2019b). Konsentrasi pada investasi yang selanjutnya menghasilkan alat-alat kapital untuk mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan output. Konsumsi sebaliknya ditekan, sehingga investasi dapat terus ada. Titik berat pada "*economic of scale*" yang berupa produksi massa (*large scale production*) dan tentunya juga membutuhkan kapital yang banyak (Clark, 1996). Ketiga, Teori Pembangunan Seimbang (*Balanced Growth Theory*) Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan (1953) dalam (Hoff, 2000), yang menitikberatkan bahwa perekonomian itu ada kemungkinan untuk berkembang. Apabila ada perimbangan yang baik antara berbagai sektor di dalam perekonomian. Dengan pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) ini diartikan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berhasil bila investasi hanya sebatas pada "titik pertumbuhan" (*growing point*) tertentu atau sektor-sektor yang sedang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat (Nath, 1962).

Investasi harus disebarakan pada semua sektor sehingga memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makin erat hubungan saling ketergantungan antar berbagai sektor maka pasar akan semakin kuat. Untuk mewujudkan teori ini tentu saja harus didukung oleh investasi yang besar. Yang terakhir, Teori Pembangunan Tidak Seimbang (*Unbalanced Growth Theory*) Teori ini dikemukakan oleh Hirschman dan Holbrook (1992) yang pada awalnya mengkritik teori pembangunan seimbang. Menurutnya bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya tidak dapat merubah sistem perekonomian yang tradisional menjadi sistem yang modern (Akamatsu, 1961). Disamping itu, kapital yang besar tidak dapat disediakan oleh negara yang masih berkembang. Justru dengan tidak adanya keseimbangan akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat dan biayabiaya ekspansi dapat diminimumkan. Bila satu sektor masih rendah outputnya maka akan tetap ada permintaan yang banyak di sektor lain dan akan ada suatu keuntungan super normal pada sektor yang rendah outputnya itu (Akamatsu, 1961).

Studi yang dilakukan oleh Kudasheva et al (2015) dan Halvarsson et al (2018) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap berkurangnya potensi ketimpangan pendapatan. Melalui investasi dibidang pendidikan, diharapkan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat mengenyam pendidikan sehingga memiliki potensi untuk keluar dari jebakan kemiskinan melalui bekerja / tidak menganggur. Halvarsson et al (2018) juga menyatakan hal yang kurang lebih sama, yakni Investasi micro berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Melalui regulasi pemerintah mikro yang pro terhadap produksi maka, diharapkan regulasi pemerintah diwajibkan untuk mengatur kemudahan investasi di level mikro (Halvarsson et al., 2018).

Menurut Mankiw (2006) Investasi merupakan komponen dari Produk Domestic Bruto (PDB) yang menunjukkan adanya keterkaitan masa kini dengan masa depan. Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu: a) Investasi bisnis tetap (*Business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi, b) investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan rumah untuk disewakan, c) investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Barang-barang tersebut akan disimpan di gudang oleh perusahaan. Menurut Sukirno (2006), investasi merupakan pengeluaran modal dari perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi dengan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi asing dibagi menjadi tiga, yaitu: Portofolio, Foreign Direct Investment (FDI) dan kredit ekspor (Sukirno, 2003)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah (Laily dan Prityadi, 2013). Menurut Alfaro dkk (2000), investasi asing langsung (FDI) memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang juga merupakan komponen makro ekonomi. Dengan adanya peningkatan FDI pada negara yang sedang berkembang akan mendorong terwujudnya labor intensive yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kapasitas output yang dihasilkan, sehingga membuktikan bahwa FDI memiliki kontribusi yang penting terhadap

perekonomian. Investasi merupakan langkah awal kegiatan untuk melakukan pembangunan ekonomi (Nguyen, 2020).

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang memcerminkan lesunya pertumbuhan ekonomi. Dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran dari upaya tiap negara tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri namun juga masyarakat atau swasta dari luar negeri (J. Y. Wu dan Hsu, 2012). Penanaman modal dalam negeri adalah sejumlah dana dari pemerintah pusat atau daerah yang berguna untuk membiayai kebutuhan publik dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari adanya penanaman modal dalam negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai modal untuk membuat jaringan-jaringan jalan raya, irigasi, rumah sakit dan sarana infrastruktur lainnya (Nguyen, 2020; J. Y. Wu dan Hsu, 2012). Dengan adanya penanaman modal asing dan dalam negeri diharapkan akan menjadi poin utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya negara berkembang. Dengan investasi baik dari asing maupun dalam negeri, negara berkembang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah (Nguyen, 2019). Maka dengan adanya investasi asing dan investasi dalam negeri akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Yang menjadi perhatian penting adalah ketika investasi terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah saja. Hal ini didasari oleh para investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal ini membuat daerah yang banyak menerima investasi dengan daerah yang kurang menerima investasi akan memiliki perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh

masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

2. Hubungan Teoritis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut: Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan (Badan Pusat Statistik, 2018), belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan (Badan Pusat Statistik, 2018); dan yang terakhir pengeluaran pembangunan dimana merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, Pemerintah memiliki 4 peran yaitu: Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar, Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *equilibrium*, dan peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Didalam Teori *Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure Theory)* ada beberapa pandangan menurut para ahli. Teori Keynes menjelaskan Persamaan keseimbangan pendapatan nasional adalah $Y=C+I+G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi

kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian (Davis et al., 1974). Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah (Bose dan Jetter, 2010). Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier effect*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (*over-heating*) (Shen et al., 2018). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan (Corbet et al., 2020).

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut (Rostow dan Musgrave, 1990). Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana

dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016). Di tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas – aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (IN Pradani, 2016).

Teori Wagner menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya. Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organic theory of state*. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak (Wagner, 1994). Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demografi; dan Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar (Castro, 2012).

Teori lain mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu teori Peacock dan Wiseman. Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak (Henrekson, 1990). Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang dan Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas (Gunasinghe et al., 2020). Maka pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Pengeluaran yang *self-liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa negara, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek

produktif barang ekspor (Gunasinghe et al., 2020b). (2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat (Y. Wu et al., 2020). (3) Pengeluaran yang tidak *self-liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya (Y. Wu et al., 2020). Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi. (4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik (Y. Wu et al., 2020). Dan terakhir (5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar (Y. Wu et al., 2020)..

Lavrinovicha et al (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh untuk memerangi ketimpangan pendapatan melalui perbaikan Human capital melalui Pendidikan. Pendidikan dan pengeluaran masyarakat memiliki kausalitas yang selaras untuk mengatasi problematika tentang kualitas hidup & dan ketimpangan pendapatan (Kim, 2016).

3. Hubungan teoritis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Castro, 2012). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Castro, 2012). Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mahmood, 1998).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) (Sutikno et al., 2015). Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang

menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2020). Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2003).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Olilingo dan Putra, 2020). Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal (Olilingo dan Putra, 2020). Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal (Olilingo dan Putra, 2020). Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila

jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (Olilingo dan Putra, 2020).

Teori pertumbuhan juga dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar (Olilingo dan Putra, 2020). Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi: 1) Perkonomian bersifat tertutup. 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan. 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*). 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Olilingo & Putra, 2020) dan (Dahliah et al., 2020).

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan (Olilingo dan Putra, 2020) dan (Dahliah et al., 2020)..

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi (Guerrini, 2006). Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja (Guerrini, 2006).

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar (Guerrini, 2006). Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi (Irfayanti dan Azis, 2012). Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat (Abulrub et al., 2012). Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal (Dahliah et al., 2020). Harus dijamin

kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik (Dahliah et al., 2020). Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali (Talkingofmoney.com, 2016) dan (Sangha et al., 2019).

Selanjutnya teori yang dikembangkan oleh Schumpeter menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada (Dahliah et al., 2020). Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi (Ryan et al., 2014). Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah (Kang et al., 2021). Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya (Grieben dan Şener, 2017). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*), namun keadaan tidak

berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik (Yessentay et al., 2020). Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah. Teori pertumbuhan baru, yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen ini dipelopori oleh (Romer, 1994; King dan Rebelo, 1988) sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori neoklasik dikembangkan dengan asumsi-asumsi pokok yaitu: Pertama, produksi dipengaruhi oleh tingkat tenaga kerja (Obradović et al., 2021). Kedua, fungsi produksi bersifat *constant returns to scale* (CRS) artinya apabila semua faktor produksi dilipatkan secara proporsional, maka output akan meningkat dengan proporsi yang sama (Solow dan Samuelson, 1953). Ketiga, peningkatan suatu faktor produksi mematuhi hukum *diminishing returns to scale*, ini berarti peningkatan output yang didapat karena tambahan 1 unit faktor produksi terakhir tidak sebesar peningkatan output dari tambahan 1 unit faktor sebelumnya (Basu dan Fernald, 1997). Keempat, pertumbuhan penduduk bersifat eksogen, konstan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti komposisi faktor produksi dan pendapatan masyarakat. Kelima, tingkat tabungan merupakan bagian tetap dari pendapatan nasional (Arnold, 2000).

Selanjutnya ada beberapa ciri penting mengenai cara pandang teori neoklasik terhadap teknologi. Pertama, teknologi bersifat eksogen yang datang demikian saja dalam proses produksi. Kedua, teknologi bersifat *pure public goods* yang mempunyai karakteristik sebagai *non-rival goods* artinya teknologi bisa

didapatkan tanpa harus bersaing satu sama lain dan sekaligus *non-excludable goods* yaitu manfaat teknologi tidak dapat dikhususkan hanya untuk sekelompok pengguna saja, atau dalam skala yang lebih luas hanya untuk suatu negara saja (Zhan dan Chen, 2021). Setiap negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Berdasarkan hal tersebut kemudian teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa salah satu kegagalan model neo-klasik dalam menjelaskan pola pertumbuhan jangka panjang adalah karena spesifikasi modelnya yang keliru selama ini (Asunakutlu, 2001). Neo-klasik menjelaskan kapital adalah mesin-mesin produksi, tidak termasuk *human capital* dan kurang memperhatikan adanya aspek *learning-by-doing* yang terus meningkat sejalan dengan masuknya pengetahuan dan ide baru yang dibawa oleh masuknya produk baru, aliran modal, atau saluran transmisi lainnya ke dalam perekonomian. Dengan adanya sumbangan *learning by-doing*, pertumbuhan suatu negara dimungkinkan tetap tinggi dan berkelanjutan. dengan memasukkan semua unsur - unsur di atas, fungsi produksi secara keseluruhan dapat bersifat linear terhadap kapital dengan pengertian kapital yang mencakup *physical capital* dan *human capital* (King dan Rebelo, 1988). Maka fungsi produksi di dalam teori pertumbuhan endogen dapat ditulis sebagai berikut: $Y = AK$ dimana A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi dan K adalah Modal fisik dan modal manusia (King dan Rebelo, 1988).

Dalam Pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan berkesinambungan, dengan K (modal) diasumsikan secara lebih luas termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Paul Romer menjelaskan tiga elemen dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, ide-ide baru

oleh perusahaan sebagai akibat dari limpahan pengetahuan (*knowledge spillover*), dan produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas (King dan Rebelo, 1988).

Teori pertumbuhan endogen berkembang dalam dua cabang pemikiran. Pertama, perilaku *learning-by-doing* dengan pengenalan hal-hal baru dalam perekonomian merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua aliran ini sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi (Wibisono, 2005).

Studi komparasi menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi pada objek suatu wilayah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Han et al., (2015). Pendekatan Kuznets theory mampu mengukur tentang masalah inequality. Inequality berasal dari peraturan dan kebijakan pemerintah (Lyubimov, 2017). *Export and compensation of labor and capital Input* berpengaruh positif dan signifikan terhadap menurunnya potensi ketimpangan pendapatan. income yang merata akan menjamin penurunan ketimpangan pendapatan (Saari, Dietzenbacher, dan Los, 2015). Terdapat perbedaan income yang menyebabkan ketimpangan berdasarkan ethnic, tenaga kerja ber-skill dan tidak ber-skill, daerah perkotaan dan pedesaan (Hassan et al., 2015).

4. Hubungan teoritis Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan (Wang et al., 2019; www.databoks.katadata.co.id, 2017).

Selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja (Inchausti-Sintes, 2015). Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2018). Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur (Bhar dan Malliaris, 2020).

Defenisi penduduk usia kerja di Indonesia sendiri dibedakan kedalam Kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut yaitu, pertama Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kedua Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Ketiga Penduduk

yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Keempat Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Kelima, Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (Inchausti-Sintes, 2015). Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya (Olilingo dan Putra, 2020). Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan

orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka.

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur (Febriana dan Yulianto, 2018). Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur (Benmelech et al., 2019). Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur diatas 15 tahun keatas. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi (Murakami, 2015). Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan (Murakami, 2015).

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Murakami, 2015). Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja (JS Saragih, 2017). Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari Tingkat

pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada atau dengan kata lain tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja (www.databoks.katadata.co.id, 2019) dan (JS Saragih, 2017).

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sector perekonomian. Terserapnya angkatan kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Penentuan usia kerja berbeda-beda pada setiap negara. Di Indonesia, penetapan usia kerja minimum adalah 10 tahun tanpa ada umur maksimum, yang berarti bahwa penduduk usia 10 tahun sudah tergolong sebagai usia kerja. Lain halnya bank dunia menetapkan batas usia kerja yaitu antara 15 hingga 64 tahun (Dumairy, 1996)

Hubungan teoritis pengangguran dengan ketimpangan pendapatan dijelaskan oleh penelitian Halvarsson yang mengatakan banyaknya pengusaha membantu mengatasi ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja (Halvarsson et al., 2018). Ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan akan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Gächter et al., 2017) dan (Shao et al., 2016).

Menurut Sjafrizal (2014) tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan

dan pendapatan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis (Muslim, 2014).

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ditinjau dari sudut individual, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalami. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya. Selain itu pengangguran juga dapat mempengaruhi taraf kesehatan keluarga (Sukirno, 2006).

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu daerah sangat menentukan pendapatan yang terdistribusi di masyarakat. Jumlah pengangguran di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia (Franita, 2016). Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan para tenaga kerja akan kesulitan mencari pekerjaan dan berpotensi untuk menganggur (Yudha, 2013). Pada akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah tersebut akan meningkat. Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut maka akan menyebabkan semakin tidak merata atau ketimpangan pendapatan yang beredar di masyarakat semakin tinggi (Yudha, 2013).

Hubungan antara penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi secara teoritis di antaranya ditunjukkan oleh Hukum Okun. Menurut Hukum Okun, terdapat relasi negatif antara pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini Okun menyatakan jika terjadi penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDB mendekati 2 persen. Dengan kata lain, Hukum Okun menyatakan apabila

PDB meningkat sebesar 2 persen, maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen (Mankiw, 2007). Hal ini disebabkan penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Okun mengungkapkan makin tinggi tingkat pengangguran, maka makin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Blanchard, 2011).

Dalam menjelaskan hubungan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, juga dijelaskan menurut Robert Solow (1956) yang dimana menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan tingkat ekonomi suatu negara, dalam model pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan exogenous growth model (model pertumbuhan eksogen). Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara di antaranya dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Temuan penting dari model Solow ini adalah adanya hubungan negatif antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Solow, 1956). Oleh karena itu, diperlukan langkah pengendalian pertumbuhan penduduk dalam suatu negara sehingga negara tersebut dapat memaksimalkan potensi faktor produksinya. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Berbeda dengan model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (constant return to scale) dengan koefisien baku, model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (diminishing returns) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow

juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoretisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dalam bentuk yang lebih formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni: $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$

Pada persamaan tersebut Y adalah Produk Domestik Bruto (PDB), K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut sebagai model pertumbuhan “eksogen”. Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional pertumbuhan output bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, penambahan modal, dan penyempurnaan teknologi. Kenaikan kuantitas dan kualitas dari tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan juga perbaikan pendidikan. Faktor penambahan modal dapat dilihat melalui tabungan dan investasi.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

C. Tinjauan Empiris

Dalam tinjauan empiris, peneliti berusaha melihat hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya nterkait dengan variable yang digunakan yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan peetumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Diantaranya hasil penelitian Liyanaarachchi (2016). Dengan judul penelitian *Impact of trade liberalisation on labour market and poverty in Sri Lanka. An integrated macro-micro modelling approach*. Penelitian ini dilakukan di negara Sri Lanka dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

Ketimpangan pendapatan juga merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya penelitian ini dilakukan oleh Olilingo dan Putra (2020) dengan meneliti variable ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan judul "*How Indonesia Economics Works: Correlation Analysis of Macroeconomics in 2010-2019*". Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah.

Ketimpangan pendapatan terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, terjadinya Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, adanya Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas social hasil penelitian tersebut dilakukan oleh Olavarría-Jaraba et al (2018) pada judul penelitian "*Analyzing relationship quality and its contribution to consumer relationship proneness. Service Business*".

Selain ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga merupakan isu penting bagi pembangunan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap Negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat dimaknai adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Olilingo dan Putra, (2020) juga menggambarkan hal yang sama. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu wilayah menurut Nguyen (2019) yang dilakukan di Vietnam dapat diperoleh dengan mengukur dengan tingkat pertumbuhannya yang kita kenal dengan

konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur. Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan fokus dari pembuat kebijakan.

Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur. Penelitian yang dilakukan oleh Davoine dan Molnar (2020) dengan judul penelitian *Cross-country fiscal policy spillovers and capital-skill complementarity in integrated capital markets. Economic Modelling* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Beberapa Studi yang telah dilakukan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan ketimpangan pendapat di Indonesia pada wilayah barat dan timur, pengeluaran pemerintah sangat memegang peranan penting didalamnya. Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Gunasinghe (2020) menjelaskan pengeluaran pemerintah juga dijelaskan melalui hukum wagner yang menyatakan tentang hukum pengeluaran pemerintah bahwa perkembangan aktivitas pemerintah berkaitan dengan fungsi administrasi dan fungsi perlindungan terhadap warga Negara. Hal ini diindikasikan oleh perubahan-perubahan yang

disebabkan oleh: peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan arus urbanisasi. Perubahan tersebut akan membutuhkan lebih banyak penyediaan fasilitas publik (perumahan, fasilitas sanitasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) serta regulasi agar wilayah perkotaan tetap tertata. Seiring dengan semakin bertambahnya kesejahteraan individu, yang diindikasikan oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang yang berkualitas baik (mewah).

Penelitian di negara Vietnam tentang *The Role of State Budget Expenditure on Economic Growth: Empirical Study in Vietnam* dilakukan Nguyen (2020) menjelaskan Secara teori, income elasticity terhadap barang-barang mewah adalah elastic. Secara umum pula diterima bahwa pendidikan, kesehatan, serta menikmati kesenian adalah barang mewah, sehingga penyediaan pemerintah atas prasarana barang-barang ini juga harus responsif terhadap peningkatan permintaan dari masyarakat. Selain daripada itu, adanya peningkatan teknologi dan perubahan pola investasi dimungkinkan akan terbentuk lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bersifat monopoli. Untuk mengatur monopoli inilah diperlukan lebih banyak regulasi dari pemerintah, dan hal ini membutuhkan anggaran yang tinggi yang tentunya pengeluaran pemerintah ini selalu dibarengi dengan kebijakan pemerintah.

Beberapa teori menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan bisa diminimalisir dengan adanya investasi-investasi baru sebagai stok modal. Semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut. Alokasi investasi yang tidak seimbang pada

wilayah tertentu akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, karena semakin tinggi investasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Besarnya investasi di setiap daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kesenjangan pendapatan masyarakat. Investasi yang tinggi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pada tinjauan empiris, penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharjee (2017) dengan judul "*Healthcare investment and income inequality*" di India menjelaskan bahwa survey pengeluaran pemerintah terhadap akses Kesehatan yang dilakukan pada 76 wilayah di India ternyata tidak berdampak baik bagi penurunan ketimpangan pendapatan di India. Bahkan hal tersebut menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih tinggi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Castro (2012) yang mengangkat judul penelitian "*Foreign direct investment in Mexico Determinants and its effect on income inequality*" di Mexico selama periode 1994 sampai dengan 2006 menjelaskan bahwa, investasi langsung cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan keterbukaan pasar terhadap investasi langsung, akan mengakibatkan upah yang rendah dan penggunaan biaya yang rendah yang dilakukan oleh para investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Tang (2021) di China yang menjelaskan hubungan variable pengeluaran pemerintah dalam pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan judul penelitian "*Does government education expenditure boost intergenerational mobility? Evidence from China*" menjelaskan bahwa survey yang dilakukan pada kelompok usia 23 tahun sampai dengan 40 tahun yang berpendapatan permanen menyatakan bahwa pengeluaran

pemerintah dibidang Pendidikan berdampak peningkatan kesetaraan peluang di negara China.

Penelitian yang dilakukan Nam (2019) yang membahas variable hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan pendapatan ternyata memiliki hubungan yang negative terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah bisa mencegah penurunan ketimpangan pendapatan antar generasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nam di United States ini berjudul *“Government spending during childhood and intergenerational income mobility in the United States”* dengan mensurvey sebanyak 4824 pasangan orang tua dan anak-anak yang digunakan untuk analisis.

Gunasinghe (2020) dalam penelitiannya *“The impact of fiscal shocks on real GDP and income inequality: What do Australian data say?”* di Australia dengan periode tahun 1965 sampai 2014 menjelaskan bahwa dampak dari kebijakan fiscal terhadap PDB riil perkapita dan ketimpangan pendapatan hasilnya memiliki tiga implikasi kebijakan utama. Pertama, pengurangan penerimaan pajak langsung meningkatkan PDB riil per kapita tanpa meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kedua, pengurangan belanja pemerintah secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ketiga, efek merugikan dari penerimaan perpajakan tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada efek redistribusi pengeluaran pemerintah, yang mempertanyakan strategi kebijakan fiskal yang dipegang secara luas menggunakan pajak tidak langsung untuk membiayai pengeluaran redistributif.

Le-rong dan Xiao-yun (2021) menjelaskan hubungan Variabel pengeluaran pemerintah pada jaminan sosial terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di China dibahas dalam judul *“The effects of social security*

expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China.” Ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran jaminan sosial dengan kesenjangan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan dalam jangka panjang, tetapi pengaruhnya sangat terbatas; hampir 99% dari perubahan kesenjangan pendapatan perkotaan-pedesaan berasal dari kontribusinya sendiri. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa elastisitas kejadian kemiskinan pedesaan terhadap pengeluaran jaminan sosial adalah -0,2255, yang menunjukkan bahwa pengeluaran jaminan sosial membantu mengurangi kemiskinan absolut pedesaan. Berdasarkan temuan ini, implikasi kebijakan dapat berupa pengeluaran jaminan sosial yang banyak dan sistem jaminan sosial yang lebih adil harus didorong. Ini akan menjadi salah satu strategi anti-kemiskinan utama setelah tahun 2020 di Tiongkok ketika mengalami masa kemiskinan absolut.

Birčiaková (2014) dalam penelitiannya *The Impact of Economic Development in the Czech Republic on the Income Inequality between Groups of Households* pada Negara Republik Czech menjelaskan bahwa pendapatan secara signifikan berpengaruh terhadap konsumsi yang juga secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Menurut Birčiaková kenaikan pendapatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, dikarenakan semakin besar pendapatan yang diterima maka akan semakin besar konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga.

Valenzuela (2021) dalam penelitiannya *The rich and mobility: A new look into the impacts of income inequality on household transport expenditure*, menggunakan variabel pengeluaran rumah tangga pada biaya transport terhadap ketimpangan pendapatan melalui pajak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa

Ketimpangan berdampak pada pengeluaran transportasi rumah tangga secara keseluruhan, dan lebih khusus lagi pada pembelian kendaraan dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Bagi rumah tangga dengan pendapatan tinggi, mereka akan meningkatkan pengeluaran keseluruhan untuk pembelian kendaraan pribadi baru dengan membayar pajak yang tinggi sehingga hal tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan dimana masyarakat dengan penghasilan rendah tidak mampu membeli transportasi sebagai fasilitas sehari-hari.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hasil studi empiris yang pernah diteliti. Penelitian ini dikembangkan melalui beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dimatriks seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
Investment on Inequality Income							
1	Healthcare investment and income inequality (Bhattacharjee et al., 2017)	Makalah ini berkontribusi pada perdebatan yang berkembang tentang apakah penyampaian perawatan kesehatan harus publik atau swasta dengan memeriksa interaksi antara bagian pengeluaran kesehatan publik dan swasta dalam ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan. Meskipun total pengeluaran untuk perawatan kesehatan publik dan swasta telah meningkat di sebagian besar negara, ada perbedaan yang cukup besar dalam campuran pengeluaran kesehatan publik dan swasta baik di dalam maupun di seluruh negara. Studi ini mengkaji masalah ini dalam dua periode model pertumbuhan generasi yang tumpang tindih di mana kematian bersifat endogen dan modal manusia adalah mesin pertumbuhan. Ada banyak bukti yang menunjukkan fakta bahwa kesehatan yang buruk di masa kanak-kanak menurunkan pendapatan masa depan melalui dampaknya pada sekolah dan partisipasi angkatan kerja.	Makalah ini membahas bagaimana bagian relatif dari pengeluaran kesehatan publik dan swasta berdampak pada ketimpangan pendapatan. Studi ini memiliki dua periode model pertumbuhan generasi yang tumpang tindih di mana umur panjang ditentukan oleh pengeluaran kesehatan swasta dan publik dan modal manusia adalah mesin pertumbuhan. Peningkatan investasi di bidang kesehatan, mengurangi kematian, meningkatkan kembali ke pendidikan dan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dalam kerangka seperti itu kami menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan lintas-bagian tidak berkurang dalam bagian pribadi dari pengeluaran kesehatan.	Public and private health Longevity Income inequality Growth	Equilibrium Theory	Kami menguji prediksi ini secara empiris menggunakan variabel yang mewakili intensitas relatif investasi (swasta versus publik) menggunakan data vaksinasi dari National Sample Survey Organization untuk 76 wilayah di India pada tahun 1986–87. Kami menghubungkannya dengan data ketimpangan pengeluaran khusus wilayah untuk periode 1987–2012. Temuan empiris kami, meskipun difokuskan pada investasi kesehatan tertentu (vaksin), menunjukkan bahwa peningkatan porsi perawatan kesehatan yang disediakan swasta menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih tinggi.	Dukungan Sitasi
2	Foreign direct investment in Mexico Determinants and its effect on income inequality (Castro, 2012)	Dimulai dengan model dua faktor Ricardian, yang menetapkan bahwa pertukaran internasional diberikan oleh adanya keunggulan komparatif antar negara, yang berarti bahwa negara-negara dengan banyak tenaga kerja paling banyak mengimpor modal, dan negara-negara dengan modal yang berlimpah paling banyak mengimpor tenaga kerja, berdasarkan saran dari Model neoklasik Stolper-Samuelson	Dengan melakukan analisis data panel di 32 entitas federal di Meksiko selama periode 1994-2006, makalah ini mempelajari determinan investasi langsung asing (FDI) dan pengaruhnya terhadap ketidaksetaraan pendapatan di dalam dan antar wilayah.	foreign direct investment, determinants, income inequality, panel data, economic growth	Economic Growth Theory	Kami mengamati bahwa tingkat pembangunan dan ukuran pasar memiliki hubungan langsung dengan FDI dan oleh karena itu, mereka cenderung meningkatkan kesenjangan ketimpangan antar daerah, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal itu menciptakan ketimpangan di dalamnya.	Gap Research

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		yang menyatakan bahwa keterbukaan pasar meningkatkan penggunaan biaya rendah, faktor yang melimpah di negara berkembang, karena ekspor dan impor menyesuaikan menurut prinsip ortodoks keunggulan komparatif. Oleh karena itu, menurut teori standar, penentu penting FDI di negara berkembang adalah tenaga kerja berbiaya rendah dan investasi asing memiliki efek distribusi pada perekonomian (Ghosh, 2003; Lee dan Vivarelli, 2006). Dalam hal ini, negara kurang berkembang memiliki keunggulan komparatif pada tenaga kerja sehingga pola pertukaran mereka berdasarkan upah, mereka mampu menarik FDI dari negara maju karena upah yang lebih rendah.					
3	Foreign direct investment and income inequality: Does the relationship vary with absorptive capacity? (J. Wu & Hsu, 2012)	Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Misalnya, Reuveny dan Li (2003) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan dikaitkan dengan distribusi pendapatan yang lebih adil di dalam negara. Edwards (1997) menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menghubungkan keterbukaan dengan liberalisasi perdagangan dengan peningkatan ketimpangan. Li dan Zou (1998) juga mengemukakan bahwa rasio ekspor terhadap PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan. Dollar dan Kraay (2002) menyimpulkan bahwa terdapat sangat sedikit bukti hubungan yang signifikan antara bagi hasil dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Di sisi lain, Spilimbergo et al. (1999) menemukan bahwa ada	Makalah ini menganalisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) pada ketimpangan pendapatan dan menanyakan apakah hubungan tersebut bergantung pada daya serap atau tidak, dengan menggunakan kumpulan data cross-sectional yang diambil dari 54 negara selama periode 1980–2005. Kami mengadopsi model regresi ambang batas endogen yang diusulkan oleh Hansen (2000) dan Caner dan Hansen (2004) dan menemukan bukti kuat dari perpecahan dua rezim dalam sampel kami.	Income inequality Foreign direct investment Absorptive capacity Threshold regression	Growth Theory	Kami mengadopsi model regresi ambang batas endogen yang diusulkan oleh Hansen (2000) dan Caner dan Hansen (2004) dan menemukan bukti kuat dari perpecahan dua rezim dalam sampel kami. Artinya, FDI cenderung berbahaya bagi distribusi pendapatan negara-negara tuan rumah dengan tingkat daya serap yang rendah. Sebaliknya, hasil kami mendukung perspektif bahwa FDI memiliki pengaruh yang kecil terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara dengan daya serap yang lebih baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata	Gap Research

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan ketimpangan. Kraay (2006) dan Lundberg dan Squire (2003) berpendapat bahwa keterbukaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan					
4	Foreign direct investment and China's regional income inequality (Yu et al., 2011)	Selain itu, untaian literatur lain lebih lanjut menegaskan bahwa saham investasi asing langsung China telah secara signifikan mendorong pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi pesisir negara itu, sementara itu memiliki sedikit dampak pada pertumbuhan PDB di provinsi-provinsi barat (Fujita dan Hu, 2001; Demurger, 2001; SunandParikh, 2001; Demurger et al., 2002; Wen, 2003; Fu, 2004). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah disparitas stok FDI regional China telah menyebabkan melebarnya ketimpangan pendapatan per kapita regional.	Makalah ini menilai dampak saham investasi asing langsung China pada ketimpangan pendapatan regionalnya menggunakan model persamaan simultan dan pendekatan dekomposisi berbasis regresi nilai Shapley.	Foreign direct investment Income inequality	Economic Growth Theory	Hasil kami menunjukkan bahwa stok investasi asing langsung China hanya menyumbang 2% dari ketimpangan pendapatan regionalnya Selanjutnya, rasio kontribusi stok investasi asing langsung per kapita terhadap ketimpangan pendapatan regional China relatif terus menurun sejak tahun 2002. Dekomposisi Hasil juga menunjukkan bahwa aset fisik per kapita provinsi menyumbang lebih dari 50% ketimpangan pendapatan nasional dan 65% dari peningkatan ketimpangan pendapatan sejak tahun 1990. Dua penentu penting lainnya dari ketimpangan pendapatan daerah adalah lokasi provinsi dan tingkat pendidikan. Namun, tingkat pendidikan ternyata memiliki pengaruh yang menurun terhadap ketimpangan pendapatan daerah	Dukungan sitasi
5	Impact of socio-economic infrastructure investments on income inequality in Iran (Zolfaghari et al., 2020)	Pertama, mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, dampaknya jauh lebih rendah daripada yang ditemukan oleh Aschauer (1989), yang secara umum dianggap sebagai titik awal dari penelitian ini. Kedua, banyak penelitian melaporkan adanya heterogenitas: pengaruh investasi publik berbeda antar negara, kawasan,	Dalam studi ini, kami mengevaluasi efek biaya infrastruktur ekonomi (energi, air, TIK) dan sosial (kesehatan, pendidikan) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Iran untuk periode 2007-2016 dengan model panel terkoreksi standar error (PCSE). .	Economic and social infrastructure; Income inequality; Panel corrected standard errors	Economic Growth Theory	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, besarnya efek ini bervariasi. Investasi pada pendidikan, kesehatan, teknologi komunikasi, energi, dan infrastruktur air memiliki dampak	Dukungan sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		<p>dan sektor. Bagaimanapun, efek dari pengeluaran investasi baru akan bergantung pada kuantitas dan kualitas persediaan modal yang ada. Secara umum, semakin besar stok, dan semakin baik kualitasnya, semakin rendah dampak penambahan stok ini. Karakter jaringan modal publik, khususnya infrastruktur, menyebabkan ketidaklinieran. Pengaruh modal baru akan sangat bergantung pada sejauh mana pengeluaran investasi bertujuan untuk mengurangi kemacetan dalam jaringan saat ini. Studi lain juga menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran investasi publik mungkin juga bergantung pada faktor kelembagaan dan kebijakan (misalnya Kemmerling & Stephan, 2002; Cadot, Röller, & Stephan, 1999; Cadot, Röller, & Stephan, 2006; Pereira & Roca-Sagales, 2001; Kejar-kejaran & De Haan, 2007).</p>				<p>terbesar pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan di daerah tertinggal, kombinasi dan alokasi infrastruktur ekonomi dan sosial yang optimal harus dipertimbangkan</p>	
6	<p>Credit market imperfection, minimum investment requirement, and endogenous income inequality (Vachadze, 2018)</p>	<p>Banyak makalah berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendapatan adalah akibatnya tentang ketidaksetaraan peluang yang dibentuk secara historis yang diwariskan lintas generasi melalui pendidikan, posisi sosial, tempat lahir, dll. 1 Friksi di pasar kredit menghasilkan hambatan masuk, menawarkan lebih sedikit peluang bagi kaum miskin, dan menyebabkan tingkat pinjaman dan dengan demikian akses ke kredit bergantung pada kekayaan dan status sosial. Orang-orang miskin kurang berinvestasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia karena keterbatasan kemampuan untuk</p>	<p>Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme umpan balik endogen dimana kesempurnaan dalam pasar kredit dapat memperkuat ketimpangan pendapatan. Ketika pengusaha tunduk pada persyaratan investasi minimum dan pendapatan masa depan pengusaha tidak sepenuhnya dapat dijamin untuk pembayaran utang, maka tingkat bunga tertinggi yang dapat ditawarkan pengusaha secara kredibel kepada deposan tidak hanya bergantung pada produk modal marjinal tetapi juga pada</p>	<p>Credit market imperfection Income inequality Kuznets curve</p>	<p>Economic Theory</p>	<p>Ketergantungan ini menciptakan sewa kewirausahaan yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada ketimpangan pendapatan. Di satu sisi, sewa kewirausahaan memperbesar ketimpangan pendapatan karena mengubah keseimbangan antara produk marjinal atas modal (dikumpulkan oleh pengusaha) dan tingkat bunga (dikumpulkan oleh deposan) dan mengubah keputusan menabung agen muda. Sewa wirausaha secara tidak langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan tenaga</p>	<p>Dukungan Sitasi</p>

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		meminjam. Akibatnya, standar hidup jangka panjang bergantung pada ketidaksetaraan awal yang dapat bertahan atau bahkan meningkat seiring waktu. Apa yang terjadi jika ketidaksetaraan tidak diturunkan dari generasi ke generasi? Apakah ketidaksempurnaan pasar kredit masih dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan? Bagaimana ketimpangan pendapatan bergantung pada parahnya ketidaksempurnaan pasar kredit dan pendapatan per kapita?	kekayaan bersih pengusaha. Ketergantungan ini menciptakan sewa kewirausahaan yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada ketimpangan pendapatan.			kerja karena mendistorsi keputusan penawaran tenaga kerja agen muda dan dengan demikian secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan tenaga kerja yang diperoleh peminjam dan pemberi pinjaman. Di bawah beberapa konfigurasi nilai parameter, model memprediksi kurva Kuznets, yaitu, hubungan U terbalik antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan	
Government Expenditure on Inequality Income							
7	Does government education expenditure boost intergenerational mobility? Evidence from China (Tang et al., 2021)	Selain kelangkaan temuan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pendidikan pemerintah, literatur telah mengevaluasi persistensi antargenerasi hampir secara eksklusif di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara (Black & Devereux, 2011). Untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian kami berfokus pada korelasi antara pengeluaran pendidikan pemerintah dan mobilitas antargenerasi di Cina. Cina telah mengalami transisi yang hebat, dengan PDB riil per kapita meningkat sekitar dua puluh kali lipat dari tahun 1980 hingga 2016. Pada saat yang sama, masalah kesetaraan kesempatan dan mobilitas sosial ekonomi telah menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, pendidikan publik telah mendominasi sistem pendidikan China, dan pengeluaran pendidikan pemerintah adalah sumber utama pendanaan untuk pendidikan publik. Pada tahun 2016, China menghabiskan hampir 3,9 triliun yuan	Artikel ini menilai hubungan antara pengeluaran pendidikan pemerintah dan mobilitas antar generasi menggunakan informasi pasangan orang tua-anak dari Studi Panel Keluarga China (CFPS) dan data pengeluaran pendidikan pemerintah dari Buku Tahunan Statistik Keuangan Pendidikan China, Buku Tahunan Statistik Provinsi, dan Statistik Kota China Buku tahunan.	Intergenerational mobility Family classification Government education expenditure	Inequality Theory	Kami memperkenalkan klasifikasi keluarga (chengfen) sebagai variabel instrumental untuk pendapatan permanen dan menggunakan pendapatan anak untuk kelompok usia 23-40 sebagai perkiraan pendapatan seumur hidup untuk meminimalkan bias estimasi. Kami menemukan bahwa elastisitas antargenerasi di Cina adalah sekitar 0,384 dan pengeluaran pendidikan pemerintah mendorong mobilitas antargenerasi. Selain itu, kami memperkirakan mobilitas absolut di Cina. Dan analisis kami menunjukkan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan mobilitas antargenerasi dari keluarga terbelakang dan meningkatkan kesetaraan peluang di Cina.	Dukungan sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		(565,6 miliar dolar AS) untuk pendidikan, dengan tingkat peningkatan tahunan sekitar 7% selama 2011–2016. Karakteristik tersebut menjadikan Cina sebagai studi kasus yang menarik untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pendidikan pemerintah dan mobilitas antargenerasi.					
8	Driving factors of CO2 emission inequality in China: The role of government expenditure (Fan et al., 2020)	Cina telah mencapai konsensus mengenai kontrol total emisi karbon dioksida (CO2); namun, ketimpangan emisi regional masih ada. Pengurangan emisi karbon adalah barang publik dan menunjukkan eksternalitas positif yang kuat, yang sulit dipecahkan di pasar. Pengurangan tersebut sangat tergantung pada kontribusi pemerintah.	Oleh karena itu, dengan menggunakan indeks Theil dan pendekatan dekomposisi indeks divisia rata-rata logaritmik, makalah ini mengintegrasikan pengeluaran pemerintah ke dalam kerangka analisis, menyelidiki faktor-faktor pendorong ketimpangan emisi dan status serta perubahan ketimpangan emisi CO2 Tiongkok dari tahun 2007 hingga 2015, yang menghubungkan ketimpangan emisi hingga disparitas dalam pengeluaran pemerintah, konsumsi energi, dan faktor sosial ekonomi lainnya.	Emission inequality Government expenditure Driving factor Decomposition analysis Theil index	Enviromental Economic Theory	Hasil empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi, distribusi penduduk, dan struktur energi merupakan prasyarat ketimpangan emisi daerah, sedangkan disparitas belanja pemerintah juga berperan penting. Di antara faktor-faktor tersebut, disparitas struktur pengeluaran menjadi penyebab utama ketimpangan emisi. Temuan makalah ini memberikan pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan kuota pengurangan emisi karbon dan menerapkan kebijakan pengurangan emisi yang berbeda secara wajar.	Dukungan sitasi
9	Government spending during childhood and intergenerational income mobility in the United States (Nam, 2019)	Salah satu faktor yang berpotensi menjelaskan mengapa pendapatan antargenerasi Mobilitas tampaknya tidak responsif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan yang merupakan peningkatan belanja pemerintah yang mungkin memainkan peran penting dalam mendorong mobilitas pendapatan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah lebih cenderung memiliki mobilitas ke atas jika pemerintah melakukan	Studi ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah selama masa kanak-kanak pada hubungan antara ketimpangan pendapatan dan mobilitas pendapatan antargenerasi. Saya menggunakan data National Longitudinal Survey of Youth 1979 dengan ukuran ketimpangan pendapatan di tingkat negara bagian dan total pengeluaran pemerintah per kapita yang mencakup pengeluaran federal, negara bagian, dan lokal	Intergenerational income mobility Income inequality Government spending Human capita	Equilibrium Theory	Studi ini memberikan bukti bahwa pengeluaran pemerintah tambahan berkontribusi untuk mempromosikan mobilitas pendapatan antargenerasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah memoderasi efek ketidaksetaraan pendapatan pada mobilitas pendapatan antargenerasi. Bukti ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam mencegah	Dukungan Sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		investasi yang efektif dalam sumber daya manusianya (Mayer & Lopoo, 2008a; Solon, 2004a). Secara konseptual, orang tua berpenghasilan rendah tidak dapat berinvestasi secara optimal pada anak-anak mereka karena kendala kredit, tetapi investasi pemerintah dapat melengkapi sebagian dari kendala kredit mereka, yang berkontribusi untuk mengembangkan modal manusia anak-anak dari keluarga ini (Mayer & Lopoo, 2008b; Solon, 2004b). Jika	untuk pendidikan, kesejahteraan publik, dan perawatan kesehatan. 4824 pasangan orang tua-anak digunakan untuk analisis.			penurunan mobilitas pendapatan antargenerasi dengan mengimbangi konsekuensi dari ketidaksetaraan pendapatan.1.	
10	The effects of social security expenditure on reducing income inequality and rural poverty in China (Le-rong & Xiao-yun, 2021)	Jaminan sosial, sebagai salah satu tujuan utamanya, menyediakan dukungan keuangan bagi mereka yang dianggap miskin atau yang terancam kemiskinan. Berdasarkan data statistik nasional Tiongkok yang mencakup asuransi sosial, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial antara periode 1978–2018	Makalah ini mengevaluasi pengaruh pengeluaran jaminan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pedesaan dengan analisis kointegrasi.	social security expenditure, income inequality, rural poverty reduction in China	Social Security Theory	Ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran jaminan sosial dengan kesenjangan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan dalam jangka panjang, tetapi pengaruhnya sangat terbatas; hampir 99% dari perubahan kesenjangan pendapatan perkotaan-pedesaan berasal dari kontribusinya sendiri. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa elastisitas kejadian kemiskinan pedesaan terhadap pengeluaran jaminan sosial adalah -0,2255, yang menunjukkan bahwa pengeluaran jaminan sosial membantu mengurangi kemiskinan absolut pedesaan. Berdasarkan temuan ini, implikasi kebijakan dapat berupa pengeluaran jaminan sosial yang banyak dan sistem jaminan sosial yang lebih adil harus didorong. Ini akan menjadi salah	Dukungan sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
						satu strategi anti-kemiskinan utama setelah tahun 2020 di Tiongkok ketika kita memenangkan pertempuran melawan kemiskinan absolut.	
11	The impact of fiscal shocks on real GDP and income inequality: What do Australian data say? (Gunasinghe et al., 2020a)	dibangun untuk ekonomi terbuka untuk tujuan identifikasi dan estimasi kontemporer. Berdasarkan bukti satu vektor kointegrasi di antara variabel, model koreksi kesalahan vektor struktural (SVEC) ditentukan untuk jangka panjang. Perpajakan langsung, penerimaan perpajakan tidak langsung dan pengeluaran pemerintah diidentifikasi sebagai guncangan kebijakan fiskal permanen. Penggunaan dua model yang berbeda secara konvergen (SVAR & SVEC) memperkuat kredibilitas hasil	Makalah ini mengkaji dampak dari tiga guncangan kebijakan fiskal terhadap PDB riil per kapita dan ketimpangan pendapatan.ity in Australia during the period 1965–2014. A small structural vector autoregressive (SVAR) model is constructed for an open economy for contemporaneous identification and estimation purposes.	Income inequality; Output; Fiscal policy; Open economy; SVAR and SVEC;	Inequality Theory	Hasilnya memiliki tiga implikasi kebijakan utama. Pertama, pengurangan penerimaan pajak langsung meningkatkan PDB riil per kapita tanpa meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kedua, pengurangan belanja pemerintah secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ketiga, efek merugikan dari penerimaan perpajakan tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada efek redistribusi pengeluaran pemerintah, yang mempertanyakan strategi kebijakan fiskal yang dipegang secara luas menggunakan pajak tidak langsung untuk membiayai pengeluaran redistributif.	Dukungan sitasi
12	The redistributive role of government social security transfers on inequality in China (Cai & Yue, 2020)	transfer pada ketidaksetaraan di Cina. Kami mencoba menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah ketimpangan pendapatan setelah transfer menyempit, dibandingkan dengan pendapatan sebelum transfer? Kedua, dengan mempertimbangkan skala dan distribusi transfer jaminan sosial pemerintah yang ada, apakah peningkatan persentase yang kecil dalam transfer akan mempersempit atau memperlebar ketimpangan pendapatan total?	Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi peran redistributif transfer jaminan sosial pemerintah terhadap ketidaksetaraan di Cina.	Redistributive effects Inequality Social security Public pensions	Social Security Theory	Dengan menggunakan metodologi indeks Musgrave-Thin (MT) dan dekomposisi koefisien Gini dari total pendapatan menurut sumbernya, kami menemukan jawaban positif untuk pertanyaan pertama dan jawaban negatif untuk pertanyaan kedua. Transfer jaminan sosial pemerintah memiliki peran positif terhadap ketimpangan dalam arti koefisien Gini pendapatan setelah transfer lebih kecil dari	Gap Research`

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
						pendapatan sebelum transfer. Namun, transfer jaminan sosial pemerintah memiliki peran negatif terhadap ketimpangan, karena ketimpangan saat ini akan meningkat jika ada peningkatan universal dalam transfer jaminan sosial pemerintah untuk semua penerima. Dari semua komponen transfer jaminan sosial pemerintah, pensiun sektor formal paling tidak merata, sedangkan manfaat pensiun dibao dan pedesaan memiliki efek yang sama pada distribusi pendapatan di Cina.	
13	The rich and mobility: A new look into the impacts of income inequality on household transport expenditures (Valenzuela-Levi, 2021)	Di bidang ekonomi, studi pengeluaran rumah tangga dimulai dengan semi-Karya terakhir Engel (1857), diterbitkan pada paruh kedua abad ke-19. Engel mengamati bahwa pengeluaran untuk makanan tumbuh lebih lambat daripada pengeluaran lainnya, membuat item ini kehilangan arti penting dalam anggaran rumah tangga karena pendapatan meningkat. Namun, pemodelan item lain dalam anggaran rumah tangga, seperti transportasi, lebih kompleks daripada menganalisis makanan. Sementara studi tentang pengeluaran transportasi rumah tangga muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengevaluasi investasi infrastruktur pada tahun 1970-an (Roth dan Zahavi, 1981; Nicholson dan Lim, 1987), hubungan antara distribusi pendapatan dan pengeluaran transportasi rumah tangga dieksplorasi untuk pertama	Meningkatnya minat terhadap keterjangkauan transportasi telah memperhatikan faktor-faktor yang mendorong pengeluaran transportasi rumah tangga. Ketimpangan pendapatan yang ada adalah bagian dari apa yang mendorong minat ini. Namun, kemungkinan hubungan sebab akibat antara distribusi pendapatan dan pengeluaran transportasi rumah tangga jarang dipelajari dalam literatur. Selain itu, beberapa studi yang ada hanya fokus pada distribusi pendapatan pasca pajak.	Transport Policy Inequality	Power Reseources Theory	Makalah ini memberikan analisis pertama yang diketahui yang mencakup distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pajak, dan fokus khusus pada satu persen orang terkaya. Regresi efek acak dan variabel instrumental digunakan untuk menganalisis data panel yang mencakup 14 negara OECD selama periode 1992–2016. Ketimpangan berdampak pada pengeluaran transportasi rumah tangga secara keseluruhan, dan lebih khusus lagi pada pembelian kendaraan dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Bagian sebelum pajak orang kaya meningkatkan pengeluaran keseluruhan untuk pembelian kendaraan pribadi baru, dengan efek penurunan ketika ketidaksetaraan pasar tinggi.	Gap Research

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		kalinya di tahun 1990-an. Misalnya, Haque (1992) menyatakan bahwa 'peningkatan per kapita dalam permintaan barang-barang transportasi dan komunikasi akan diremehkan jika distribusi pendapatan tidak dipertimbangkan' (Haque 1992:52). Namun, meskipun pengeluaran transportasi rumah tangga terus menjadi subjek penelitian baru, ketidaksetaraan pendapatan hanya dianggap sebagai variabel penjelas dalam jumlah penelitian yang berkurang (Storchmann, 2005; Lescaroux, 2010; Valenzuela-- Levi, 2018).				Pangsa masyarakat miskin pasca-pajak berpengaruh terhadap pengoperasian peralatan transportasi, tetapi tanda dari pengaruh ini bergantung pada tingkat ketimpangan pasca-pajak yang ada.	
Investment on Inequality Income							
14	Effects of Access to Education and Information-communication Technology on Income Inequality In Kazakhstan (Kudasheva et al., 2015)	Artikel ini mengkaji pengaruh akses pendidikan dan teknologi informasi-komunikasi terhadap ketimpangan distribusi penduduk menurut pendapatan.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa rendahnya aksesibilitas ke pendidikan profesional dan teknologi informasi-komunikasi merupakan faktor peningkatan ketimpangan pendapatan di Kazakhstan.	Investasi bid. Pendidikan Ketimpangan pendapatan	Equality theory	Investasi bidang Pendidikan → Signifikan → Pengurangan Ketimpangan pendapatan dimasa depan	Dukungan sitasi
15	Entrepreneurship and income inequality (Halvarsson et al., 2018)	Penelitian kewirausahaan menyoroti kewirausahaan sebagai sumber simultan dari mobilitas pendapatan yang ditingkatkan untuk beberapa orang, tetapi potensi sumber kemiskinan bagi orang lain.	Penelitian tentang ketidaksetaraan telah mengembangkan jenis model baru untuk menguraikan dan mempermasalahkan berbagai sumber ketidaksetaraan pendapatan, tetapi perhatian terhadap kewirausahaan sebagai pilihan pekerjaan yang semakin lazim dalam model ini masih kurang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrepreneurship ▪ Investasion ▪ Ketimpangan pendapatan ▪ Poverty 	Income Dynamics theory	Investasi micro → signifikan → pengurangan ketimpangan pendapatan sehingga disarankan regulasi pemerintah mikro mewajibkan mengatur kemudahan investasi di level mikro	Dukungan sitasi
16	Analysis of the hysteresis of unemployment in Mexico in the face of macroeconomic	Ada beberapa hipotesis tentang penggabungan histeresis dalam pasar tenaga kerja karena kekurangan yang ada dalam Kurva Phillips, yang dikemukakan oleh ekonom William	Penelitian ini menyajikan perilaku tingkat pengangguran Meksiko dan menunjukkan ketergantungan dengan variabel sejarah dan makro. Konsep histeresis atau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Labor Market ▪ Level Moneter <ul style="list-style-type: none"> - Gross capital formation - Export 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foreign trade theory ▪ Inflasi theory 	Monetary level → signifikan → ketersediaan pasar tenaga kerja Investasi → Ketersediaan pasar tenaga kerja	Dukungan sitasi & Adjustment Construct untuk variabel investasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
	shocks (Trejo García et al., 2017)	Phillips pada tahun 1958.3 Fokus jangka panjang yang diusulkan dan hubungan yang ada antara tingkat pengangguran alami (NRU), 4 dalam teori, bertemu pada keseimbangan beberapa peristiwa yang meragukan hubungan ini, seperti selama tahun tujuh puluhan tingkat inflasi yang tinggi dan tingkat pengangguran mengakhiri hubungan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi tingkat pengangguran terhadap variasi inflasi. Analisis ketenagakerjaan secara tradisional menyajikan gagasan bahwa pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor eksogen dalam jangka panjang (harga faktor produktif dan teknologi, dll.). jangka pendek, perubahan terjadi pada penawaran dan permintaan, menghasilkan penyimpangan sehubungan dengan pengangguran alami. Dampak langsung dari tingkat inflasi tidak berpengaruh dalam jangka panjang dengan kembalinya pengangguran ke keseimbangan semula, sehingga keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran alamiah juga jelas.	ketekunan mencoba memisahkan inersia ini dalam tingkat pengangguran dan beberapa faktor makroekonomi dan endogen.	<ul style="list-style-type: none"> - Monetary attachment ▪ Investasi ▪ Pengangguran 		Investasi & Level monetary → signifikan → ekspor → berdampak tidak langsung terhadap tingkat pengangguran dalam jangka panjang	Sitasi lanjutan hubungan intevening
17	Animal spirits, investment and unemployment: An old Keynesian view of the Great Recession (Guerrazzi, 2015)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi ▪ GDP ▪ Konsumsi ▪ Biaya Investasi ▪ Produktivitas ▪ Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keynesian Theory ▪ General Theory ▪ Capital Theory Equilibrium Unemployment Theory	Investasi & GDP & Konsumsi & Biaya Investasi → Produktivitas yang berbanding lurus dan equilibrium terhadap penurunan tingkat pengangguran	Dukungan sitasi & Adjustment construct untuk variabel investasi Tulisan ini juga bisa dijadikan bahan perbandingan

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
18	Econometric Estimation of the Relationship between Unemployment Rate and Economic Growth of FYR of Macedonia (Sadiku et al., 2015)	sangat sedikit upaya telah dilakukan untuk negara berkembang, termasuk TA Makedonia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan secara empiris hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dengan menerapkan 'Hukum Okun', serta untuk menguji apakah itu berlaku, untuk kasus FYR Makedonia. Untuk menganalisa koefisiennya penulis menggunakan empat jenis model yaitu model perbedaan, model dinamik, model ECM dan metodologi VAR, untuk data triwulanan periode 2000-2013 dengan mempertimbangkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. istilah kemungkinan hubungan. Para penulis menyimpulkan dengan membahas solusi atas fenomena ini di bagian dari pembuat kebijakan, sehingga makalah ini memberikan pendekatan yang menarik untuk masalah penting	Studi ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan empirical antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Macedonia dengan mengaplikasikan the Okun's Law. Untuk menganalisis koefisien Okun's digunakan beberapa model seperti the dynamic model, ECM, and pendekatan estimasi VAR, in order to consider both, the short term and the long term possible relationship. The analysis consists on quarterly data covering the period 2000-2012.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio Pengangguran ▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ GDP 	Unemployment Theory	<p>Pertumbuhan Ekonomi → tidak signifikan → rasio pengangguran</p> <p>NB: Government policy terbukti tidak mampu membina pengembangan dan pengurangan rasio pengangguran</p>	Gap Research
19	Influence of energy use, foreign direct investment and population growth on unemployment for Russian Federation (Sadikova et al., 2017)	Studi ini menyelidiki hubungan antara pengangguran, penggunaan energi, pertumbuhan populasi dan investasi asing langsung terhadap pengangguran di Rusia menggunakan data Quarterly dari tahun 1992-2015.	Studi ini menerapkan kointegrasi Johansen untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara variabel yang diperkirakan. Elastisitas jangka panjang dan kausalitas Granger diselidiki di bawah kerangka VECM.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GDP ▪ Unemployment <ul style="list-style-type: none"> - Salary High price - Low price salary - Price of labour force ▪ Investment 	Unemployment Theory	Investasi → signifikan terhadap peningkatan upaya pengurangan pengangguran	Dukungan sitasi
20	Euro, crisis and unemployment: Youth patterns, youth policies? (Ghoshray et al., 2016)	Kami mengungkap tanggapan yang berbeda dari tingkat pengangguran orang dewasa dan pemuda. Sementara pengangguran dewasa lebih rentan mengalami pemutusan struktural, pengangguran kaum muda lebih sensitif terhadap osilasi siklus bisnis, terutama	Makalah ini mengkaji terjadinya pemutusan struktural pada pengangguran Eropa yang terkait dengan acara kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ unemployment <ul style="list-style-type: none"> - Moneter - Crisis ▪ Labor market 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unemployment theory ▪ NAIRU theory ▪ Equilibrium Theory 	<p>Labor market → tidak signifikan → pengangguran</p> <p>Investasi pemerintah dibidang Pendidikan menjadi saran penting untuk mengatasi</p>	Gap Research

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		dalam krisis baru-baru ini. Hal ini membutuhkan penyesuaian langkah-langkah kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk kaum muda yang menganggur di masa-masa sulit				pengangguran. Melalui pemenuhan kompetensi	
21	FDI and The Unemployment - A Causality Analysis for the Latest EU Members (Strat et al., 2015)	FDI telah dianggap dalam beberapa tahun terakhir, oleh negara-negara berkembang, sebagai salah satu alternatif terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Stabilitas makroekonomi dan pasar tenaga kerja suatu perekonomian telah diidentifikasi oleh literatur, sebagai beberapa aspek utama yang dianalisis oleh investor asing sebelum memutuskan untuk negara tuan rumah di masa depan. Dampak sebaliknya juga disebutkan oleh para peneliti yang memberikan bukti kuat yang mendukung hipotesis bahwa FDI membawa manfaat penting bagi tuan rumah negara	Akibatnya, mempelajari saling ketergantungan antara arus masuk FDI dan pengangguran menjadi tinggi kepentingan untuk setiap negara yang menunjukkan peningkatan minat dalam menarik investasi langsung asing. Analisis saat ini dilakukan untuk periode 1991 – 2012, pada data tahunan (untuk tiga belas negara anggota UE terbaru) yang diunduh dari web halaman Bank Dunia. Metodologi ekonometrika didasarkan pada prosedur T-Y yang digunakan dengan tujuan: menganalisis hubungan kausal jangka pendek antara dua variabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FDI (Foreign Direct Investation) ▪ Unemployment 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sustainability Theory ▪ Investment Theory 	Investasi asing → tidak signifikan → Pengurangan pengangguran	Gap Research
22	Military Expenditure and Unemployment in China (Qiong & Junhua, 2015)	Peningkatan berurutan dalam pengeluaran militer China telah menyebabkan perdebatan di seluruh dunia. Bertujuan pada satu yurisdiksi yang mengalami peningkatan dalam pengeluaran militer membantu menstabilkan tingkat pengangguran yang meningkat, dan mengetahui hubungan pertahanan-pengangguran hampir tidak diteliti dalam konteks China, studi ini berhasil memverifikasi validitas yurisdiksi ini dan untuk menutup lowongan di China dengan pendekatan empiris menggunakan data 1991-2013.	Setelah menguji properti deret waktu dari empat variabel (tingkat pengangguran, pengeluaran militer, pengeluaran non-militer dan PDB), model ARDL (Autoregressive Distributed Lag) diterapkan sebagai dasar estimasi kami. Yang mengejutkan kami, pengeluaran militer mendorong tingkat pengangguran, sedangkan peningkatan rekan non-militernya menekan tingkat tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment ▪ Government Expenditure ▪ Unemployment 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Okun's Law ▪ Government Investment theory 	Investasi → signifikan → pengurangan pengangguran	Dukungan sitasi
23	The nexus among foreign investment,	Terakhir, berdasarkan tiga untaian penelitian sebelumnya kita dapat	The objective of this paper is to estimate an econometric model for	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment - FDI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment Theory 	Investment → signifikan → Economy growth	Dukungan Sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
	domestic capital and economic growth: Empirical evidence from the MENA region (Omri & kahouli, 2014)	melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak modal domestik. Juga ditemukan bahwa modal domestik memiliki peran yang sangat menentukan dalam peningkatan aliran masuk FDI. Oleh karena itu. Layak untuk menyelidiki hubungan antara FDI, modal domestik dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkannya secara bersamaan dalam kerangka pemodelan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan kausalitas antara tiga variabel di atas untuk 13 negara MENA dengan menggunakan kerangka model pertumbuhan dan model persamaan simultan yang diestimasi dengan metode umum momen (GMM) selama periode 1990–2010.	analysing the Interrelationship among foreign direct investment, domestic capital and economic growth in 13 MENA countries by using a 'growth model' frame work and simultaneous-equation Models estimated by the generalized method of moments (GMM) during the period 1990– 2010.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Economy Growth <ul style="list-style-type: none"> - GDP - CPI (Consumer Price Index) ▪ Unemploymentnet <ul style="list-style-type: none"> - TFP (Total Factor Productivity) 			
24	The Relationship between the Generation of Electricity from Renewable Resources and Unemployment: An Empirical Study on the Egyptian Economy, (Khodeir, 2016)	Saat ini, ada tren global menuju penggunaan sumber daya energi terbarukan. Hal ini karena manfaatnya dalam hal diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Mengingat penderitaan ekonomi Mesir dari masalah pengangguran kronis, makalah ini telah mengadopsi efek pembangkit listrik dari sumber daya terbarukan pada pengangguran	Ini menguji hipotesis yang menyiratkan hubungan terbalik antara pembangkit listrik terbarukan dan tingkat pengangguran di Mesir. Dengan menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk mengidentifikasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang selama periode (1989-2013), ditemukan bahwa hipotesis tercapai dalam jangka panjang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment ▪ Unemployment Rate 	Autoregressive Distributed lag	Investasi → Signifikan tidak Langsung → Unemployment Rate	Gap Research tidak langsung
25	The Relationship Between Unemployment and Output in Egypt, (Elshamy, 2013)	Hukum Okun adalah hubungan kunci dalam ekonomi mikro dan menemukan bahwa hubungan tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan PDB sebesar 3% menyebabkan penurunan 1% dalam pengangguran Okun (1970).	Baru-baru ini, banyak penelitian menemukan bahwa hubungan antara PDB dan pengangguran tidak 3% seperti yang disarankan oleh hukum Okun, tetapi terkadang antara 2,5% dan 2% (Samuelson	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unemployment rate 	Okun's Law	Re-adjustment Okun's Law. Hasil menyatakan Okun's Law masih relevan dipenelitian ini.	Dukungan sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
			dan Nordhaus, 1995). Makalah ini menguji koefisien Okun di Mesir. Makalah ini menggunakan analisis kointegrasi untuk memperkirakan koefisien Okun dalam jangka panjang. dan dalam jangka pendek dengan menggunakan Mekanisme Koreksi Kesalahan (ECM).				
Economic Growth on Inequality Income							
26	China's income inequality in the global context, (Han et al., 2015)	Meskipun PDB China telah menjadi terbesar kedua di dunia, pertumbuhan ekonomi jangka panjang China dengan kecepatan tinggi dan pedoman kebijakan "efisiensi pertama" yang tahan lama, telah membawa China ke dalam situasi yang rumit, di dalamnya ketimpangan serius terjadi di China dan telah menjadi salah satu masalah paling serius di Cina saat ini.	Makalah ini berfokus pada isu-isu ketidaksetaraan China dalam konteks dunia, terutama pada perbandingan antara China dan negara-negara Eropa, mengenai pengejaran kita bersama untuk nilai-nilai sosialis. Metode perbandingan banyak digunakan dalam makalah ini. Koefisien Gini dan Persentase Pendapatan Total Penduduk Nasional menurut Kuintil Pendapatan digunakan sebagai indikator utama, dan kedua hasilnya hanya saling memverifikasi satu sama lain. Kami menemukan bahwa ketidaksetaraan besar di Cina tidak cocok dengan gelar negara sosialis dan tingkat sosialisnya jauh lebih sedikit daripada Eropa, bahkan lebih rendah dari negara-negara kapitalis pada umumnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inequality gap ▪ Gini Ratio ▪ Total Income 	Economic Disparitas Theory	Studi Comparasi yang menyatakan bahwa terdapat ketimpangan pada negara socialist (china) vs Kapitalis (eropa)	Gap Research Comparasi sistem ketatanegaraan antara socialist vs kapitalis
27	Growth and inequality in public good provision, (Gächter et al., 2017)	Dalam desain eksperimental baru, kami mempelajari permainan barang publik dengan saling ketergantungan dinamis, di mana kekayaan masing-masing agen pada akhir periode t berfungsi sebagai sumbangannya di t+1. saya	Dalam pengaturan ini, pertumbuhan dan ketidaksetaraan muncul secara endogen sehingga memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan baru mengenai interaksi dan efeknya pada kerja sama.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wealth ▪ Economy Growth 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subgame Theory ▪ Equilibrium Theory 	Perbedaan level dan status kesejahteraan → ketimpangan pendapatan	Dukungan Sitasi
28	Income inequality and the labour	Kami mempelajari ketidaksetaraan pendapatan rumah tangga di Inggris	Untuk lebih memahami perbandingan ini, kami memeriksa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Income Growth ▪ Wages 	Inequality Theory	Studi Comparasi menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan	Dukungan sitasi yang

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
	market in Britain and the US, (Blundell et al., 2018)	Raya dan Amerika Serikat dan interaksi antara tenaga kerja pendapatan pasar dan sistem pajak. Sementara Inggris dan AS telah menyaksikan peningkatan sekuler di 90 / 10 ketidaksetaraan pendapatan laki-laki selama tiga dekade terakhir, ukuran ketidaksetaraan dalam pendapatan keluarga bersih ini telah menurun di Inggris, sementara di AS meningkat.	interaksi antara pendapatan pasar tenaga kerja dalam keluarga, perkawinan bermacam-macam, pajak, dan sistem tunjangan kesejahteraan dan rumah tangga ketimpangan pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> Net income 		ekonomi objek → signifikan → ketimpangan pendapatan	menyatakan bahwa perbedaan sistem ukuran negara mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
29	Income Inequality Revisited 60 Years Later: Piketty vs Kuznets, (Lyubimov, 2017)	Makalah ini, bagaimanapun, tidak akan meninjau mekanisme yang disebutkan di atas atau lainnya cara tradisional bahwa ketimpangan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, seperti efek dari ketidaksetaraan pendapatan pada stabilitas politik dan dengan demikian pada ukuran investasi atau pengaruh ketimpangan pada angka kelahiran dan oleh karena itu pada tingkat pertumbuhan. Ini mekanisme telah ditinjau dalam literatur dengan cukup rinci. Signifikan bagian dari makalah ini membahas buku oleh Thomas Piketty, di mana, bertentangan dengan ramalan Simon Kuznets, penulis menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan dalam beberapa dekade terakhir, serta bahaya perlambatan ekonomi pembangunan, yang mungkin diakibatkan oleh ketimpangan yang semakin besar, yang pertama-tama terkait dengan pengaruh ekonomi dan politik yang lebih kuat dari individu yang lebih makmur.	This paper compares two popular views on the evolution of income inequality. The article by Simon Kuznets, which was published in American Economic Review in 1955, considers inequality as a byproduct of economic growth and suggests that a relatively rich economy should also be less unequal. In contrast, Thomas Piketty indicates that inequality is progressing, and an internationally coordinated policy is required to bring inequality under control.	<ul style="list-style-type: none"> Inequality Economy growth 	Kuznets Theory	Pendekatan Kuznets theory mampu mengukur tentang masalah inequality. Inequality berasal dari peraturan dan kebijakan pemerintah	Dukungan sitasi untuk melihat perbandingan dukungan kebijakan terhadap ketimpangan pendapatan
30	Sources of Income Growth and Inequality Across Ethnic Groups in	Malaysia dipilih karena tiga alasan utama. Pertama, kerusuhan etnis berdarah Mei 1969 menyoroti bahaya	Makalah ini mengkaji sumber-sumber pertumbuhan pendapatan bagi kelompok etnis besar di Malaysia. Analisis dekomposisi	<ul style="list-style-type: none"> Income distribution 	Content Analysis	Export & compensation of labor & Capital Input → signifikan → income. income yang merata akan	Dukungan sitasi

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
	Malaysia, 1970-2000, (Saari et al., 2015)	yang dapat muncul dalam masyarakat multiras ketika prasangka etnis diperburuk oleh disparitas pendapatan (lihat Faaland, Parkinson, & Saniman, 2003; Heng, 1997; Shari, 2000). Dalam periode pasca kemerdekaan (1957–1969) sedikit yang telah dilakukan untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada orang miskin, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup baik. Pada tahun 1970, pendapatan per kapita orang Cina dan India 129% dan 76% lebih tinggi dari mereka Melayu. Aspek lain yang berkontribusi terhadap kerusuhan etnis adalah bahwa kegiatan ekonomi sebagian besar dijalankan oleh non-Melayu sedangkan pengambilan keputusan politik didominasi oleh orang Melayu. Akibat kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kebijakan pertumbuhan telah bergeser dari strategi yang semata-mata menekankan pada pertumbuhan ekonomi ke arah kebijakan yang bertujuan menggabungkan pertumbuhan dengan pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis. Pergeseran kebijakan ini diformalkan dalam Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) untuk periode 1971-1990 (lihat Unit Perencanaan Ekonomi, beberapa tahun). Meskipun pertumbuhan ekonomi memuaskan, kesenjangan pendapatan tetap ada besar—pada tahun 2005, pendapatan per kapita etnis Cina dan India adalah 64% dan 27% lebih tinggi daripada etnis Melayu.	struktural input-output diperluas dan diterapkan pada matriks akuntansi sosial tahun 1970 dan 2000.			menjamin penurunan ketimpangan pendapatan. Terdapat perbedaan income yang menyebabkan ketimpangan berdasarkan etnic, tenaga kerja ber-skill dan tidak ber-skill, daerah perkotaan dan pedesaan	
31	Territorial Inequalities and	Ketidaketaraan teritorial mewakili subjek jangka panjang dalam ekonomi	Dalam konteks ini, makalah ini memperkenalkan indeks sintetik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inequality ▪ Economy growth 	Inequality Theory	GDP → signifikan → inequality	

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
	Economic Growth in Romania. A Multi-factor Approach, (Goschin, 2015)	regional dan banyak metode statistik yang bertujuan untuk itu menyediakan data dan informasi yang relevan tentang besaran dan evolusi disparitas yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Ini juga merupakan topik yang menarik di Rumania, mengingat kesenjangan pembangunan di antara kabupaten terus meningkat sejak transisi ke ekonomi pasar, meskipun banyak strategi yang secara eksplisit menargetkan mereka.	baru dari ketidaksetaraan teritorial yang mencakup tiga variabel: PDB / kapita, produktivitas tenaga kerja dan harapan hidup. untuk menangkap berbagai aspek disparitas spasial ekonomi dan sosial. Pendekatan metodologis ini menawarkan gambaran yang lebih baik dan lebih kompleks tentang kesenjangan pembangunan wilayah, dibandingkan dengan analisis yang menggunakan indikator individual. Kami selanjutnya menilai dampak kesenjangan teritorial (yang diukur dengan indeks sintesis ini) pada pembangunan ekonomi di Rumania selama 1995-2012, melalui model pertumbuhan ekonomi.				
32	The Impact of Economic Development in the Czech Republic on the Income Inequality between Groups of Households, (Birčiaková et al., 2014)	Dari hasil analisis situasi pendapatan rumah tangga yang telah dilakukan dan dipublikasikan, muncul beberapa pertanyaan yang belum terjawab tentang apakah pembangunan ekonomi telah mempengaruhi semua kelompok pendapatan rumah tangga dengan ukuran yang sama. Periode pengamatan mencakup tahun 2005-2012, merupakan periode pertumbuhan ekonomi, krisis dan stagnasi dan dinyatakan sebagai PDB per kapita. Untuk menggambarkan situasi rumah tangga sebagai variabel utama, total pendapatan kotor seperti yang dilaporkan dalam survei utama Statistik Pendapatan dan Kondisi Hidup Uni Eropa (EU SILC) telah digunakan. Makalah ini menggunakan data empiris dan melalui fungsi matematika	Parameter fungsi yang dipilih memungkinkan kami menganalisis sifat perubahan pada keduanya variabel selama periode waktu yang diamati. Makalah ini bertujuan untuk menjawab apakah fungsi yang paling tepat menggambarkan tren pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan peningkatan tahunan yang tumbuh dalam kesenjangan di kedua variabel yang diamati (menyerupai gunting terbuka), dapat digunakan untuk menggambarkan pergerakan kedua variabel untuk kelompok rumah tangga yang berbeda menurut kuintil klasifikasi dengan penekanan pada rumah tangga yang berisiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consumption ▪ Income ▪ Inequality 	Inequality Theory	Income → signifikan → Consumption → signifikan → Inequality	

No	Penulis / Judul / Tahun	Research Problem	Research Purpose	Variabel / Construct / Item	Grand Theory	Simpulan Hasil	Role
		menggambarkan evolusi situasi pendapatan rumah tangga. Demikian pula, studi empiris pada pengeluaran total rumah tangga menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangga (konsumsi rumah tangga) mengalami peningkatan selama periode observasi.	kemiskinan. Tren ekonomi yang berbeda memanasikan dirinya dalam perbedaan cara untuk kelompok rumah tangga terpilih dan berdampak negatif pada ketimpangan pendapatan.				

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir pada penelitian ini, merupakan alur pikir untuk memudahkan dalam memahami tujuan penelitian yang ingin dicapai. Karena itu, kerangka konseptual disusun berdasarkan alur pikir penelitian yang bersumber dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Dalam analisis permasalahan digunakan pendekatan deduktif (studi teoritik) dan pendekatan induktif (studi empirik) dengan tujuan untuk memperjelas proses penulisan dan penjelasan permasalahan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pada kerangka konseptual ini, analisis masalah ketimpangan pendapatan dihubungkan dengan variable-variabel yang terkait seperti investasi, pengeluaran pemerintah, pengangguran serta pertumbuhan ekonomi diwilayah bagian barat dan timur Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan menjadi tujuan setiap wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini terlihat dari meningkatnya konsumsi akibat meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan ekonomi itu sering ditafsirkan sebagai pertambahan pendapatan nasional atau produk bagi suatu bangsa, tanpa mempersoalkan siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dicapai tidak menjamin pemerataan hasil pembangunan, justru dengan hasil laju pertumbuhan yang tinggi itu diikuti pula ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, disamping terjadinya urbanisasi

yang tidak dapat dibendung, sebagai akibat dari menumpuknya industrialisasi di daerah perkotaan.

Permasalahan lain yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu adanya kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja yang dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Investasi meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input. Oleh adanya investasi- investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang menyerap tenaga kerja berkompeten dan berkualitas. Salah satu input yang mendorong salah satunya adalah tenaga kerja, tenaga kerja merupakan faktor pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi. Karena adanya investasi akan meningkatkan kesempatan kerja. Tetapi pemerataan penyerapan tenaga kerja tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasi (terpusat)nya penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Hampir 60 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di pulau Jawa, sedangkan di luar pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya juga melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong permintaan produksi dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah pada kerangka konsep dibawah ini berpengaruh negative secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh negative melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh positif melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia. Belanja modal

merupakan bentuk dari bentuk pengeluaran pemerintah yang dimana belanja modal diperuntukkan untuk berbagai pengeluaran pemerintah lainnya seperti penyediaan infrastruktur yang nantinya akan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Distribusi alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di beberapa wilayah terjadi ketimpangan. Perbedaan ini disebabkan alokasi belanja pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja publik kurang menyentuh masyarakat. distribusi dana ke dalam pos-pos anggaran seharusnya dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap sarana dan prasarana umum. Pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk beberapa wilayah di Indonesia sangat berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan cenderung meningkat namun Pendapatan Asli Daerah yang berbeda menjadi sebab kurang optimalnya pengeluaran belanja publik untuk program-program pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Dengan demikian analisis investasi,

pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan penting dilakukan.

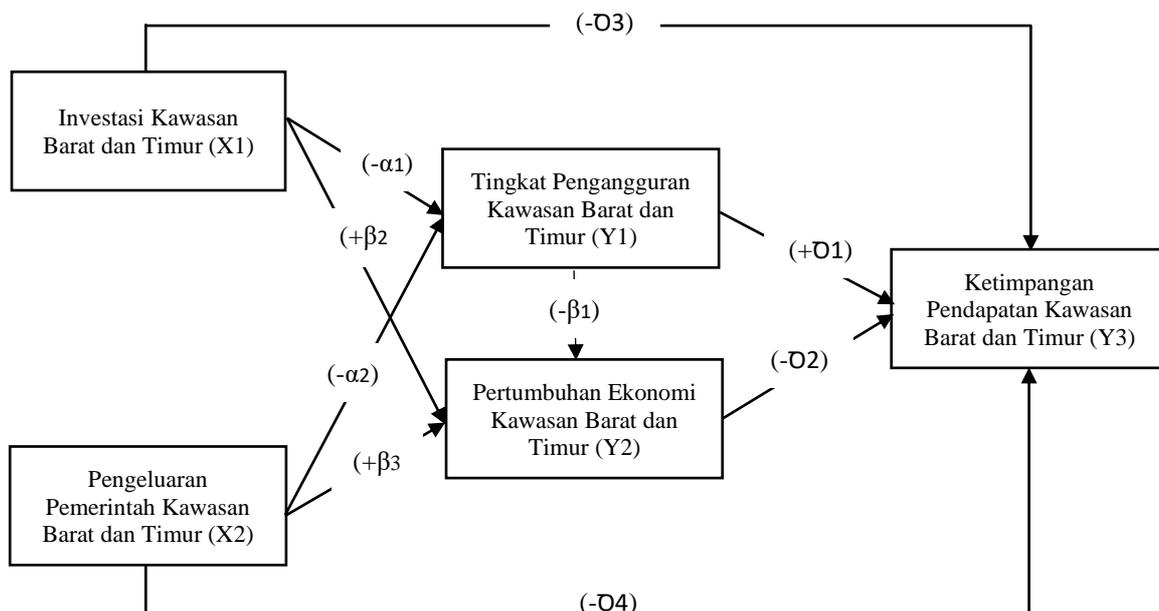
Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Dalam kerangka konsep dibawah ini, investasi secara langsung berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Secara tidak langsung melalui tingkat pengangguran berpengaruh secara negative dan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif. investasi diharapkan mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan diberbagai wilayah di Indonesia.

Todaro dalam bukunya yang berjudul pembangunan ekonomi di dunia ketiga menyatakan bahwa ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan rakyat. Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita.

Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak langsung terhadap ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan efisien akan memberdayakan setiap individu (warga), sehingga mampu meningkatkan kecepatan pertukaran barang dan jasa (*velocity of circulation*), yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan dampaknya akan mengurangi ketimpangan (*inequality*) selanjutnya kesejahteraan masyarakat terwujud.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dahulu, dan juga tinjauan pustaka maka kerangka konseptual yang diajukan dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan variable bebas yang berpengaruh langsung terhadap ketimpangan pendapatan sebagai variable endogen. Sedangkan variable investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konsep yang dibangun, digambarkan seperti pada Gambar 4.



Gambar 5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada gambar 5 dikembangkan melalui beberapa hasil penelitian yang secara komprehensif dijelaskan pada sub-bab selanjutnya

B. Hipotesis Penelitian

Keterkaitan antara Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan

Peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan GDP, secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung

turun. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dimasyarakat juga dapat diminimalisir.

Hasil penelitian mengungkapkan hal yang sejalan dengan itu, yakni adanya pengaruh yang signifikan antara investasi, pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh (Afidchao et al., 2014; Szkorupová, 2014; Mihaiu dan Opreana, 2013). Hasil studi empiris yang telah dibahas sebelumnya juga mengungkapkan hal yang sama yakni adanya keterkaitan yang positif antara investasi dan ketimpangan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh (Kudasheva et al., 2015; Halvarsson, Korpi, dan Wennberg, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang merata, dimulai dari investasi yang positif, efektif sehingga dapat berdampak signifikan terhadap penurunan rasio pengangguran (Trejo et al., 2017; Guerrazzi, 2015; Sadikova et al., 2017; Qiong dan Junhua, 2015; Khodeir, 2016; Elshamy, 2013) akan tetapi hasil penelitian dari (Sadiku et al., 2015; Strat et al., 2015; Ghoshray et al., 2016) mengungkapkan bahwa tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat pengangguran. Pemanfaatan belanja pemerintah dioptimalkan baik dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Belanja negara yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui aktivitas pembelanjaan yang bersifat efektif dan bermanfaat baik jangka pendek maupun jangka Panjang seperti pembangunan

infrastruktur guna memudahkan moda transportasi dan kegiatan perekonomian. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan mendorong penurunan rasio pengangguran melalui kegiatan-kegiatan usaha baik skala makro maupun mikro. Pengangguran yang dapat ditekan akan berpengaruh signifikan terhadap menurunnya rasio ketimpangan pendapatan. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh (Lavrinovicha et al., 2015; Kim, 2016; Raišienė et al., 2014; Qiong dan Junhua, 2015; Bouwmeester dan Scholtens, 2017; O'Campo et al., 2015; Bouwmeester dan Scholtens, 2017; Shen et al., 2018; Mihaiu dan Opreana, 2013; Candemir dan Zalluhoglu, 2011). Akan tetapi terdapat pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh (Adriana, 2014; Roşoiu, 2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Han et al., 2015) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dengan sistem ketatanegaraan yang berbeda juga berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang dibangun didalam penelitian ini menyatakan bahwa:

H1= Terdapat pengaruh negative dan signifikan secara langsung variable investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh negative secara tidak langsung variabel investasi melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh positif secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah barat Indonesia.

H2= Terdapat pengaruh negative dan signifikan secara langsung variable pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh negative secara tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh positif secara

tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah barat Indonesia.

H3= Terdapat pengaruh negative dan signifikan secara langsung variable investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh negative secara tidak langsung variabel investasi melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh positif secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah timur Indonesia.

H4= Terdapat pengaruh negative dan signifikan secara langsung variable pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh negative secara tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah melalui tingkat pengangguran serta berpengaruh positif secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada wilayah timur Indonesia.

H5= Terdapat perbedaan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan timur Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia dengan factor yang mendasari adalah adanya perbedaan atau ketimpangan pendapatan antar wilayah yang terlihat dari rasio gini antar wilayah. Pemerintah hendaknya segera mengambil kebijakan yang bisa mengurangi ketimpangan pendapatan tersebut dengan mengambil Langkah-langkah strategis dan komprehensif dalam upaya pengentasannya yang dimana akan menimbulkan masalah baru. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran serta pertumbuhan

ekonomi antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik diwilayah barat maupun diwilayah timur Indonesia.